



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Web : <http://bpbd.tanjabbarkab.go.id> email : bpbd@tanjabbarkab.go.id



RANHIR RENSTRA TAHUN 2025-2029



KUALA TUNGKAL, 04 NOVEMBER 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Swt Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) TA. 2025-2029 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.2850 Tahun 2025 Tentang Mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Lampiran IV : Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA RKPD)

Kami menyadari bahwa Rencana Strategis (Renstra) yang telah kami susun ini masih belum sempurna sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra ini merupakan gambaran arah kebijakan Penanggulangan Bencana (PB) di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai acuan dalam menyusun program dan kegiatan tahunan selama lima tahun kedepan

Kemudian kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas kerjasamanya dalam penyusunan Renstra ini, selanjutnya kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan. Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan bimbingan dan kekuatan kepada kita dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

KualaTungkal, September 2025

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



Drs. Zulfikri, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19660528 199103 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	8
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	 10
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	10
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	17
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	20
2.4 Kelompok Sasaran Layanan	
 BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	 39
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	39
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	45
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra Provinsi/ Kab/Kota	50
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	60
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Pelayanan	62
 BAB IV PROGRAM,KEGIATAN,SUBKEGIATAN,DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
4.1 Program Kegiatan, Subkegiatan Prioritas Daerah	
4.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2029	
4.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2025 – 2029	
 BAB V PENUTUP	 80
 LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan paradigma penanganan bencana di Indonesia yang telah mengalami pergeseran, yaitu penanganan bencana tidak lagi menekankan pada aspek tanggap darurat, tetapi lebih menekankan pada keseluruhan manajemen risiko bencana. Sebagai respon dari perubahan paradigma penanggulangan bencana tersebut maka ditetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dimana pada ketentuan umumnya dinyatakan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, telah ditetapkan 3 (tiga) Peraturan Pemerintah sebagai turunan dari Undang-Undang dimaksud, yang meliputi: (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana; (3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana yang selanjutnya merupakan dasar untuk mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.

Selanjutnya secara eksplisit Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan dan mengatur urusan pemerintahan dan kewenangan daerah yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 11 ayat (1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Pasal 11 ayat (2) Urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Pasal 12 ayat (1) *Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: Pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; *ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan sosial*.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota sebagaimana termuat pada lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa bencana dan kebakaran secara implisit berada pada *pembagian urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat* Sub Urusan Bencana dan Sub Urusan Kebakaran.

Adapun Sub Urusan Bencana kewenangan urusannya adalah Penanggulangan Bencana Kabupaten.

Untuk mewujudkan dan melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan tersebut, di Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah terbentuk kelembagaan Penanggulangan Bencana yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Bab. VI Ketentuan Peralihan Pasal 13 ayat 2 Nomenklatur Badan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomo 8 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran diubah menjadi Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Badan Penanggulangan Bencana telah menyusun Rencana Strategis Perubahan 2025-2029 sebagai dokumen perencanaan program kegiatan dan anggaran serta acuan pelaksanaan dalam pencapaian sasaran jangka menengah lima tahun yang diselaraskan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di daerah sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah daerah dapat langsung memberikan kontribusi dan inovasi nyata terhadap peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan perlu perencanaan daerah yang matang.

Renstra Perubahan SKPD atau Rencana Strategis Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan masa Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD dan Masyarakat memberikan perhatian penting pada kualitas proses penyusunan dokumen Renstra SKPD, dan tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas implementasinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029, disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut ;

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sumber daya Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat,

telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaah Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana, telaahan Renstra BPBD Provinsi Jambi, telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategis dan arah kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencaaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

kedudukan dan fungsi yang sangat strategis dan yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan perangkat daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 serta mengacu pada dokumen perencanaan provinsi maupun nasional.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menggambarkan pelayanan perangkat daerah dan pengembangannya serta tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun mendatang, dan bagaimana mencapainya serta langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan dalam rangka mengimplementasikan Visi dan Misi Bupati terpilih periode Tahun 2025-2029, agar terwujud penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang

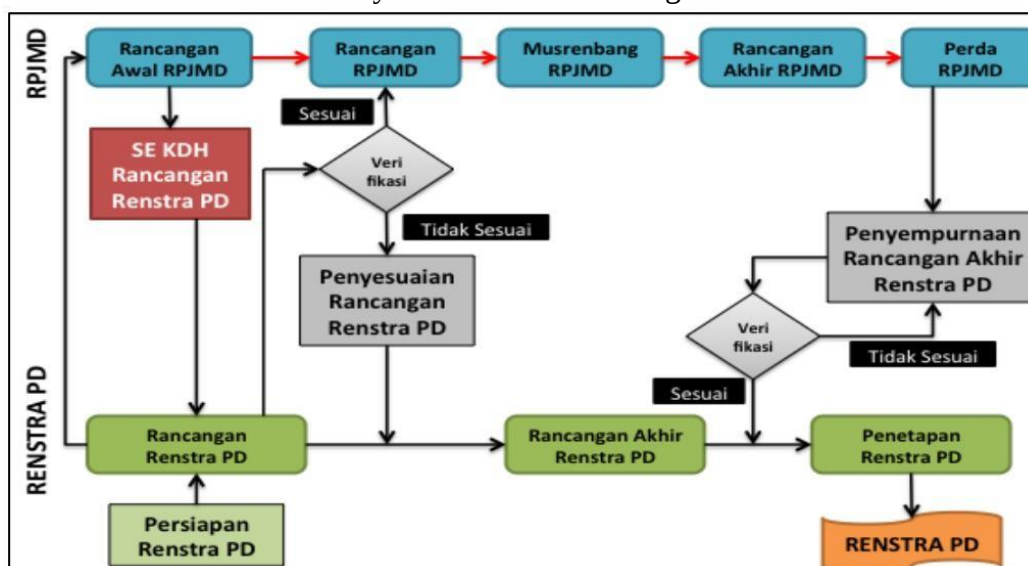
berkualitas. Renstra Perangkat Daerah ini akan menjadi pedoman dan bahan dalam penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 tahapan lima (5) tahun yang keempat dalam rangka mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025, yang disusun secara terintegrasi dan menyeluruh dengan mengedepankan partisipasi masyarakat dan aspirasi stakeholder pembangunan lainnya.

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui beberapa tahapan proses penyusunan renstra yang mengacu kepada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Renstra
2. Penyusunan rancangan awal Renstra
3. Penyusunan rancangan Renstra
4. Perumusan renstra; dan
5. Penetapan Renstra.

Adapun bagan alur dari tahapan penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada gambar 1.1 :

Gambar 1.1
Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Dengan disusunnya Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029, diharapkan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya untuk meningkatkan kualitas kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian, dan evaluasi kinerja. Keberhasilan peningkatan tersebut adalah untuk mewujudkan tercapainya sasaran pembangunan daerah (RPJMD) dan renstra Perangkat Daerah, serta menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama lima tahun.

1.2 Landasan Hukum

Renstra OPD Tahun 2025-2029 Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mengatur dan berelevansi terhadap struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD, meliputi sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di Profinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur(Lembaran Negara Republik
2. Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
9. sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Kalsifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Kepala BNPB Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar;
23. Peraturan Kepala BNPB Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
24. Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana;
25. Peraturan Kepala BNPB Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Risiko Bencana.
26. Peraturan Kepala BNPB Nomor 8 Tahun 2011 tentang Standardisasi Data Kebencanaan;

27. Peraturan Kepala BNPB Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitupasna);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 5); jo Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 tahun 2012;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 2);

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 a. Maksud

Maksud penyusunan Renstra Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun 2025-2029 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

b. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Renstra Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu;

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2025-2029 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mendukung Visi dan Misi Bupati.
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk kurun waktu tahun 2025-2029 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya serta sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang merupakan dokumen perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahunan dalam kurun waktu tahun 2025-2029.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029, disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut ;

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sumber daya Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat, telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaah Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana, telaahan Renstra BPBD Provinsi Jambi, telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis. Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategis dan arah kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif, Pada bagian ini dikemukakan indicator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencaaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran berubah menjadi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana yang mempunyai **Tugas**:

1. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
4. Menyusun, menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
7. Melaksanakan penanggulangan bencana di daerahnya;
8. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
9. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai **fungsi**:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana serta penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Adapun struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari:

1. **Kepala Badan** yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah mempunyai tugas memimpin BPBD dan menjalankan tugas dan fungsi BPBD
2. **Unsur Pengarah** mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada kepala BPBD dalam penanggulangan bencana. Dan mempunyai fungsi :
 - 1) Perumusan konsep kebijakan penanggulangan bencana;
 - 2) Pemantauan;
 - 3) Pelaksanaan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
3. **Unsur Pelaksana**, dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi BPBD dalam menjalankan tugas sehari-hari, Kepala Pelaksana berada dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.

1. Kepala Pelaksana

Kepala Pelaksana mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan penyiapan perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana;
- 2) Pelaksanaan fungsi koordinasi, pengkomandoan dan pelaksanaan di bidang penanggulangan bencana;
- 3) Pelaksanaan penetapan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 4) Pelaksanaan penyusunan, penetapan dan penginformasikan peta rawan bencana;
- 5) Pelaksanaan penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanggulangan bencana;
- 6) Pelaksanaan pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- 7) Pelaksanaan pengendalian, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- 8) Pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerahnya;
- 9) Pelaksanaan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pemerintah Pusat;
- 10) Pelaksanaan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretaris

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerjasama.

Sekretariat mempunyai fungsi :

- 1) Pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi program perencanaan dan perumusan kebijakan dilingkungan BPBD;
- 2) Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler;
- 4) Fasilitasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unsur pengarah BPBD;
- 5) Pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya;
- 6) Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana.

2.1. Subbag Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Subbagian Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris untuk merencanakan, menyusun program, melaksanakan monitoring, evaluasi serta pelaporan terhadap program kegiatan BPBD. Subbagian Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan rencana dan program kerja tahunan BPBD;
- 2) Penyiapan penyusunan rencana, pengawasan dan pengembangan sistem dan koordinasi pelaksanaan program bidang BPBD;
- 3) Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan;
- 4) Pengumpulan dan penganalisis data pelaksanaan program kegiatan;
- 5) Pelaksanaan pendataan akibat bencana;
- 6) Pelaksanaan penyusunan kebutuhan rehabilitasi, pasca bencana;
- 7) Pelaksanaan monitoring terhadap kegiatan di bidang BPBD;
- 8) Pelaksanaan evaluasi terhadap kegiatan BPBD;
- 9) Penyusunan laporan kegiatan BPBD, yang mencakup Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan BPBD;

10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2.2. Subbag Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan rencana anggaran belanja BPBD;
- 2) Penyiapan rencana kebutuhan dan penggunaan biaya rutin dan biaya perjalanan dinas serta merencanakan kebutuhan biaya BPBD;
- 3) Pelaksanaan pemeliharaan arsip dan dokumentasi keuangan dilingkungan BPBD dan melaporkan serta mempertanggung jawabkan kepada atasan;
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2.3. Subbag Kepegawaian dan Umum

Sub bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan surat menyurat, arsip, administrasi ketatausahaan dan urusan perlengkapan, kehumasan dan keprotokolan.

Sub bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan pendataan, perencanaan, koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sosialisasi bidang BPBD;
- 2) Pelaksanaan administrasi surat masuk dan surat keluar serta perencanaan rapat-rapat dan penerimaan tamu serta perencanaan evaluasi tentang organisasi dan ketatausahaan BPBD;
- 3) Pelaksanaan pengelolaan urusan perlengkapan;
- 4) Pelaksanaan pengelolaan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- 5) Pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan Subbag Kepegawaian dan Umum;
- 6) Pelaksanaan pemeliharaan dan pengelolaan inventaris milik Negara dan daerah yang dikelola BPBD;
- 7) Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian Unsur Pelaksana BPBD;
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Bidang Kesiapsiagaan, Sarana dan Prasarana

Bidang kesiapsiagaan, Sarana dan Prasarana mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, peringatan dini, mitigasi, kesiapsiagaan pra bencana dan kegiatan sarana dan prasarana.

Bidang kesiapsiagaan, Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

- 1) Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan, peringatan dini, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana;
- 2) Perumusan kebijakan dan strategi pencegahan, peringatan dini, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- 3) Penyusunan rencana kerja dan program pencegahan, peringatan dini, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- 4) Pengkajian dan analisis kemungkinan dampak bencana;
- 5) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;

- 6) Penyusunan perumusan kebijakan semua program dan kegiatan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam lingkup perlengkapan sarana dan prasarana penunjang penanganan bencana;
- 7) Penyusunan kebijakan rencana kebutuhan dan perlengkapan sarana dan prasarana BPBD;
- 8) Pelaksanaan pengkoordinasian dalam rangka pengadaan sarana dan prasarana;
- 9) Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dibidang pencegahan, peringatan dini, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- 10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3.1. Subbid Kesiapsiagaan

Subbid Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Kesiapsiagaan, Sarana dan Prasarana dalam penyusunan kebijakan, pengkoordinasian, hubungan kerja, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesiapsiagaan.

Subbid Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan dan strategi pencegahan, dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- 2) Pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan program pencegahan, kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- 3) Penyiapan bahan kajian dan analisis kemungkinan dampak bencana;
- 4) Penyiapan bahan kajian pengurangan risiko bencana;
- 5) Pelaksanaan pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- 6) Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dibidang pencegahan, dan kesiapsiagaan prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- 7) Penetapan rencana lokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia;
- 8) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan dibidang kesiapsiagaan prabencana;
- 9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3.2. Subbid Sarana dan Prasarana

Subbid Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Kesiapsiagaan, Sarana dan Prasarana dalam penyusunan kebijakan, pengkoordinasian, hubungan kerja, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Sarana dan Prasarana.

Subbid Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan rencana kegiatan BPBD serta rencana kebutuhan dan perlengkapan BPBD;
- 2) Pelaksanaan perencanaan pengadaan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan penanganan bencana;
- 3) Pelaksanaan pengecekan, perbaikan serta pemeliharaan sarana dan prasarana;

- 4) Pelaksanaan penyelenggaraan administrasi penerimaan dan pengeluaran sarana dan prasarana BPBD;
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Bencana dan Rehabilitasi

Bidang Bencana dan Rehabilitasi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana, dan rehabilitasi pada pasca bencana serta menyusun prosedur tetap tanggap darurat bencana.

Bidang Bencana dan Rehabilitasi mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan dan strategi bidang penanggulangan bencana dan rehabilitasi pasca bencana;
- 2) Perumusan kebijakan dan petunjuk teknis operasional dibidang penanggulangan bencana dan rehabilitasi pasca bencana;
- 3) Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana dan rehabilitasi pasca bencana;
- 4) Pelaksanaan hubungan kerja dibidang penanggulangan bencana dan bidang rehabilitasi pasca bencana;
- 5) Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana dan bidang rehabilitasi pasca bencana;
- 6) Pelaksanaan Pengkoordinasian Penyuluhan dan Pelatihan tentang mekanisme Tanggap Darurat;
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4.1. Subbid Penanggulangan Bencana

Subbid Penanggulangan Bencana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Bencana dan Rehabilitasi dalam penyusunan kebijakan, pengkoordinasian, hubungan kerja, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanggulangan bencana pada saat bencana dan rehabilitasi pasca bencana.

Subbid Penanggulangan Bencana mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan perumusan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- 2) Penyusunan rencana dan program kerja tahunan seksi;
- 3) Penyusunan bahan penetapan status keadaan darurat dan penanggulangan bencana;
- 4) Pelaksanaan koordinasi dibidang Penanggulangan Bencana pada saat darurat;
- 5) Pelaksanaan pengkajian dan identifikasi penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- 6) Pelaksanaan komunikasi, konsultasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka mengadakan evaluasi, pemberian bantuan dan penanganan bencana;
- 7) Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan atasan, sesuai dengan lingkup tugas.

4.2. Subbid Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Subbid Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Bencana dan Rehabilitasi dalam penyiapan penyusunan kebijakan pelaksanaan pengkoordinasian program dan strategi penanggulangan bencana pada tahapan pasca bencana.

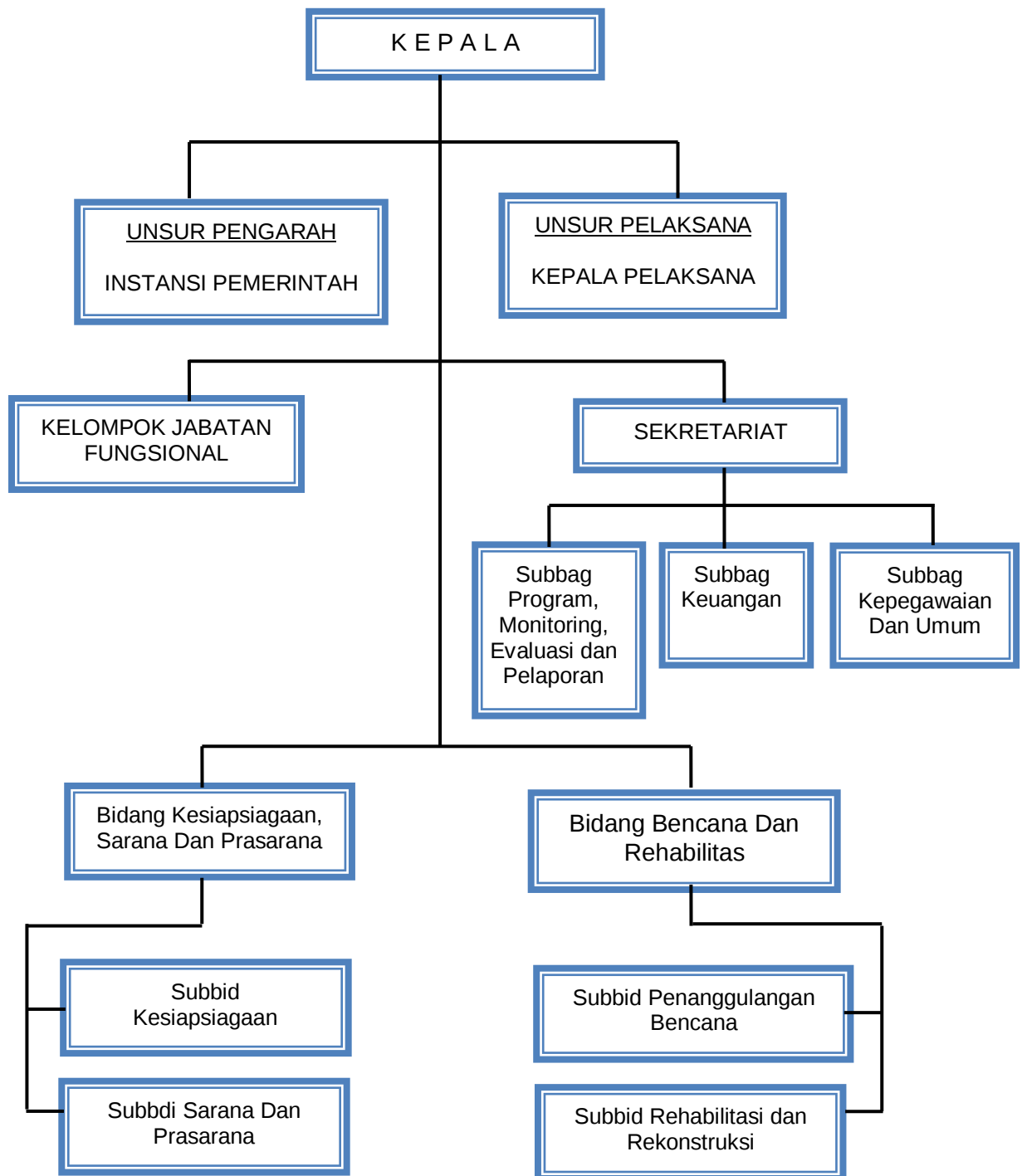
Subbid Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan kebijakan dan strategi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- 2) Pelaksanaan penyusunan rencana program tahunan seksi;
- 3) Pelaksanaan koordinasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- 4) Pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan perbaikan lingkungan daerah bencana dan perbaikan sarana dan prasarana umum;
- 5) Pelaksanaan koordinasi kegiatan pelayanan kesehatan;
- 6) Pelaksanaan koordinasi pemulihan sosial psikologis, sosial ekonomi budaya dan pemulihan keamanan dan ketertiban;
- 7) Pelaksanaan penggalangan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- 8) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

STRUKTUR ORGANISASI

Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat
dapat dilihat pada bagan dibawah ini

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



2.2. Sumber Daya SKPD

2.2.1 Sumber Daya Aparatur

Sumber daya aparatur Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat berjumlah orang, terdiri dari PNS sebanyak 21 orang dan Satgas TKS/TKK sebanyak 78 orang. Adapun susunan kepegawaian dan tingkat pendidikannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Pangkat/Gol

No	Status Pegawai	Pangkat	Gol	Jumlah
1.	P N S	Pembina Utama Muda	IV/c	-
2.	P N S	Pembina Tk. I	IV/b	1
3.	P N S	Pembina	IV/a	3
4.	P N S	Penata Tk.I	III/d	3
5.	P N S	Penata	III/c	3
6.	P N S	Panata Muda Tk.I	III/b	-
7.	P N S	Penata Muda	III/a	3
8.	P N S	Pengatur Tk.I	II/d	2
9.	P N S	Pengatur	II/c	4
10.	P N S	Pengatur Muda Tk.I	II/b	2
11.	P N S	Pengatur Muda	II/a	-
12.	P N S	Juru Tk.I	I/d	-
13.	P N S	Juru	I/c	-
14.	P N S	Juru Muda Tk.I	I/b	-
	Jumlah			21
15.	Honorer/TKS/TKK	-	-	14
16.	Honorer/THL/TRC	-	-	64
	Jumlah Total			99

Tabel 2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	S2	1
2.	S1	10
3.	D 3 / Diploma 3	1
4.	SLTA / Sederajat	9
5.	SLTP/Sederajat	-
	Jumlah	21

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki guna memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagaimana tabel pada lampiran.

Selain itu, peralatan TRC-PB yang dimiliki BPBD Kab. Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.2.2.1
Daftar Peralatan TRC-PB BPBD Kab. Tanjung Jabung Barat
Tahun 2025

NO.	JENIS BARANG		JUMLAH	SATUAN	KONDISI	
					BAIK	RUSAK
1	2		3	4	5	6
1	KENDARAAN RODA 4 (EMPAT)					
	a.	Mobil Double cabin (Mobil Rescue)	2	Unit	1	1
	b.	Mobil Truck Serbaguna	1	Unit	1	
	c.	Mobil Single Cabin	1	Unit	1	
	d.	Mobil Mitsubishi Triton	1	Unit	1	
	e.	Mobil Mini bus Toyota rush	1	Unit	1	
	f.	Mobil mini bus Toyota new rush	1	Unit	1	
2	KENDARAAN RODA 2 (Dua)					
	a.	Sepeda Motor Trail	10	Unit	5	5
	b.	Sepeda motor Yamaha Zupiter	2	Unit	2	
	c.	Sepeda motor Yamaha Scorpio	1	Unit	1	
	e.	Sepeda motor Honda vario	7	Unit	6	1
	f.	Sepeda motor Yamaha RX king	1	unit		1
3	KENDARAAN RODA 3 (Tiga)					
		Viar	2	Unit	1	1
4	SPEED BOAT					
	a.	Speed Boat Polyethylene	1	Unit		1
	b.	Speed Boat + 40 PK	1	Unit		1
5	MESIN PEMADAM					
	a.	Shibaura TF 745	2	Unit	1	1
	b.	Shibaura TF 516	3	Unit	1	2
	c.	Mesin Apung	2	Unit	1	1
	d.	Tohatsu V 80	1	Unit		1
	e.	Tohatsu VC 82 ASE	1	Unit	1	
	f.	Tohatsu V 52 AS	1	Unit	1	
	g.	Tohatsu V 20 D25	2	Unit	1	1
	h.	Honda XV 340 (Apung)	2	Unit	1	1
	i.	Mesin jinjing Honda GXH 50 series	4	unit	4	
	j.	Wick 250	1	Unit		1
6	SELANG PEMADAM					
	a.	Selang Pemadam 2,5 Inch	147	Unit	50	97
	b.	Selang Pemadam 1,5 Inch	31	Unit	20	11

7	NOZZLE					
	a.	Nozzle L	8	Unit	6	2
	b.	Nozzle Straight Ukuran 2,5"	4	Unit	4	
	c.	Nozzle Straight Ukuran 1,5"	8	Unit	4	4
	d.	Nozzle Pistole Grid 2,5"	2	Unit	2	
8	ALAT KOMUNIKASI					
	a.	Handy Talky	29	Unit	4	25
	b.	RIG	4	Unit		4
	c.	SSB	1	Unit	1	
	e.	Global Positioning system	2	Unit	1	1
	f.	Antenna gasden	2	Unit	2	
	g.	Breket anten mobil	2	Unit	2	
	h.	Radio	1	Unit	1	
	i.	Radio icom	1	Unit		1
	j.	Camera video phantom	2	Unit	2	
	k.	Camera digital	3	Unit	1	2
	l.	Handycam	1	Unit	1	
	m.	Layer film proyektor	2	Unit	1	1
	n.	Unit power supply	3	Unit	3	
	o.	Pc.unit	7	Unit	5	2
	p.	Laptop	19	Unit	5	14
	q.	Printer	9	Unit	4	5
	r.	scanner	1	Unit		1
9.	ALAT PENERANGAN					
	a.	Solar Lampu (Lampu Penerangan)	2	Unit	2	
	b.	Head lamp	3	Unit	2	1
	c.	Senter Kecil	3	Unit	1	2
	d.	Senter Besar	3	Unit	1	2
	e.	Lampu tembak	2	Unit		2
	f.	Lampu sirene	3	Unit	3	
10	ALAT KANTOR LAINNYA					
	a.	AC. Split	6	Unit	3	3
	b.	Meja	39	Unit	39	
	c.	Kursi Rapat	63	Unit	63	
	d.	Kursi putar Tanpa Lengan	7	Unit	3	4
	e.	Kursi putar Pakai Lengan	4	Unit	4	
	f.	Kursi tamu ukiran hongkong	1	Unit	1	
	g.	Lemari Buku Arsip	4	Unit	4	
	h.	Filling cabinet besi	2	Unit	2	
	i.	Mesin absen	1	Unit	1	
	j.	brandkas	2	Unit	1	1
	k.	sofa	1	Unit	1	
	l.	Lemari es	1	Unit	1	
	m.	televisi	2	Unit	1	1
	n.	dispenser	2	Unit	2	
	o.	karpas	7	Unit	5	2
	p.	Gorden kray	1	Unit	1	

	q.	Treng/ tandon air,200Lt dan 1000Lt	5	Unit	5	
10.	a.	Y Konektor 2,5"x1,5"x1,5"	1	Unit	1	
	b.	Y Konektor 2,5"x2,5"x1,5"	1	Unit	1	
11.		Embung Kapasitas 1500 liter	2	Unit	2	
12		TENDA				
	a.	Tenda Posko	1	Unit	1	
	b.	Tenda Pengungsi	2	Unit	1	1
	c.	Tenda Keluarga	2	Unit	2	
	d.	Tenda Regu	1	Unit		1
	e.	Tenda Cabin	2	Unit		2
13		PERALATAN LAINNYA				
	a	Perahu Karet	1	Unit	1	
	b	Mesin Perahu 18 K	1	Unit	1	
	c	Genset 5,5 KUA	1	Unit	1	
	d	Chainsaw	1	Unit	1	
	e	Water Treatment Portable	1	Unit	1	
	f	Water Treatment Portable Mini	2	Unit	1	1
	g	Mesin Pompa Air	6	Unit	4	2
	h	Staright	5	Unit	5	
	i	teropong	3	Unit	2	1
	j	Auto stop	2	Unit	2	
	k	Pulley speed	2	Unit	2	
	l	Pulley fixed	4	Unit	4	
	m	Pulley rescue	4	Unit	4	
	n	Tali karmantel static	2	Unit	2	
	o	Tali karmantel dynamic	2	Unit	2	
	p	Tali webbing roll	2	Unit	2	
	q	Tandu basket	2	Unit	2	
	r	Descender figure 8	4	Unit	4	
	s	Jumar ascender	4	Unit	4	
	t	Tangga aluminium	1	Unit		1
	u	Chain Saw Kecil	1	Unit	1	1
	v	handspayer	10	unit	10	
	w	Gepyok/Flapper	5	Unit	5	
	x	Golok	10	Unit		10
	y	Angkong	3	Unit	1	2
	z	Alat deteksi mayat	1	Unit	1	
14		LOGISTIK				
	a	Peralatan dapur	1	Paket	1	
15		ALAT ALAT KERJA DAN PERSONAL USE TRC				
	a.	Sarung Tangan	30	Buah		30
	b.	Kaca Mata Kerja	20	Buah		20

	c.	Kapak Kombinasi	10	Buah	2	8
	d.	Sekop Kecil	10	Buah	2	8
	e.	Sekop Besar	10	Buah	2	8
	f.	Vell Bed	50	Buah	7	43
	g.	Rompi	29	Buah	29	
	h.	Body hernes	6	Buah		6
	i.	Sleeping Bag	40	Buah	10	30
	j.	Kacamata (Google)	60	Buah		40
		Jumlah Sarana	847	Buah	417	430

Tabel. 2.2.2.2
Daftar Inventaris BPBD Kab. Tanjung Jabung Barat
Tahun 2025

NO.	JENIS BARANG		JUMLAH	SATUAN	KONDISI	
					BAIK	RUSAK
1	2		3	4	5	6
1	KENDARAAN RODA 4 (EMPAT)					
	a.	Mobil Double cabin (Mobil Rescue)	2	Unit	2	
	b.	Mobil Truck Serbaguna	1	Unit	1	
	c.	Mobil Single Cabin	1	Unit		1
	d.	Mobil Mitsubishi Triton	1	Unit	1	
	e.	Mobil Mini bus Toyota rush	1	Unit	1	
	f.	Mobil mini bus Toyota new rush	1	Unit	1	
2	KENDARAAN RODA 2 (Dua)					
	a.	Sepeda Motor Trail	10	Unit		
	b.	Sepeda motor Yamaha Zupiter	2	Unit	2	
	c.	Sepeda motor Yamaha Scorpio	1	Unit	1	
	e.	Sepeda motor Honda vario	7	Unit	6	1
	f.	Sepeda motor Yamaha RX king	1	unit		1
3	KENDARAAN RODA 3 (Tiga)					
		Viar	2	Unit	2	
4	SPEED BOAT					
	a.	Speed Boat Polyethylene	1	Unit		1
	b.	Speed Boat + 40 PK	1	Unit		1
5	MESIN PEMADAM					
	a.	Shibaura TF 745	2	Unit	2	
	b.	Shibaura TF 516	3	Unit	2	1
	c.	Mesin Apung	2	Unit	2	
	d.	Tohatsu V 80	1	Unit		1
	e.	Tohatsu VC 82 ASE	1	Unit	1	
	f.	Tohatsu V 52 AS	1	Unit	1	
	g.	Tohatsu V 20 D25	2	Unit	1	1
	h.	Honda XV 340 (Apung)	2	Unit	1	1
	i	Mesin jinjing Honda GXH 50 series	4	unit	4	

	j.	Wick 250	1	Unit		1
6	SELANG PEMADAM					
	a.	Selang Pemadam 2,5 Inch	147	Unit	50	97
	b.	Selang Pemadam 1,5 Inch	31	Unit	20	11
7	NOZZLE					
	a.	Nozzle L	8	Unit	6	2
	b.	Nozzle Straight Ukuran 2,5"	4	Unit	4	
	c.	Nozzle Straight Ukuran 1,5"	8	Unit	4	4
	d.	Nozzle Pistole Grid 2,5"	2	Unit	2	
8	ALAT KOMUNIKASI					
	a.	Handy Talky	29	Unit	9	20
	b.	RIG	4	Unit		4
	c.	SSB	1	Unit	1	
	e.	Global Positioning system	2	Unit	1	1
	f.	Antenna gasden	2	Unit	2	
	g.	Breket anten mobil	2	Unit	2	
	h.	Radio	1	Unit		1
	i.	Radio icom	1	Unit		1
	j.	Camera video phantom	2	Unit	2	
	k.	Camera digital	3	Unit	1	2
	l.	Handycam	1	Unit	1	
	m.	Layer film proyektor	2	Unit	1	1
	n.	Unit power supply	3	Unit	3	
	o.	Pc.unit	6	Unit	5	1
	p.	Laptop	19	Unit	5	14
	q.	Printer	9	Unit	4	5
	r.	scanner	1	Unit		1
9.	ALAT PENERANGAN					
	a.	Solar Lampu (Lampu Penerangan)	2	Unit	2	
	b.	Head lamp	3	Unit	2	1
	c.	Senter Kecil	3	Unit	1	2
	d.	Senter Besar	3	Unit	1	2
	e.	Lampu tembak	2	Unit		2
	f.	Lampu sirene	3	Unit	3	
10	ALAT KANTOR LAINNYA					
	a.	AC. Split	6	Unit	3	3
	b.	Meja	39	Unit	39	
	c.	Kursi Rapat	63	Unit	63	
	d.	Kursi putar Tanpa Lengan	7	Unit	3	4
	e.	Kursi putar Pakai Lengan	4	Unit	4	
	f.	Kursi tamu ukiran hongkong	1	Unit	1	
	g.	Lemari Buku Arsip	4	Unit	4	
	h.	Filling cabinet besi	2	Unit	2	
	i.	Mesin absen	1	Unit	1	
	j.	brandkas	2	Unit	1	1
	k.	sofa	1	Unit	1	

	l.	Lemari es	1	Unit	1	
	m.	televisi	2	Unit	1	1
	n.	dispenser	2	Unit	2	
	o.	karpas	7	Unit		
	p.	Gorden kray	1	Unit	1	
	q.	Treng/ tandon air	5	Unit	5	
10.	a.	Y Konektor 2,5"x1,5"x1,5"	1	Unit	1	
	b.	Y Konektor 2,5"x2,5"x1,5"	1	Unit	1	
11.		Embung Kapasitas 1500 liter	2	Unit	2	
12		TENDA				
	a.	Tenda Posko	1	Unit	1	
	b.	Tenda Pengungsi	2	Unit	2	
	c.	Tenda Keluarga	2	Unit	2	
	d.	Tenda Regu	1	Unit		1
	e.	Tenda Cabin	2	Unit		2
13		PERALATAN LAINNYA				
	a	Perahu Karet	1	Unit	1	
	b	Mesin Perahu 18 K	1	Unit		1
	c	Genset 5,5 KUA	1	Unit	1	
	d	Chainsaw	1	Unit	1	
	e	Water Treatment Portable	1	Unit	1	
	f	Water Treatment Portable Mini	2	Unit	1	1
	g	Mesin Pompa Air	2	Unit	2	
	h	Staright	5	Unit	5	
	i	teropong	3	Unit	2	1
	j	Auto stop	2	Unit	2	
	k	Pulley speed	2	Unit	2	
	l	Pulley fixed	4	Unit	4	
	m	Pulley rescue	4	Unit	4	
	n	Tali karmantel static	2	Unit	2	
	o	Tali karmantel dynamic	2	Unit	2	
	p	Tali webbing roll	2	Unit	2	
	q	Tandu basket	2	Unit	2	
	r	Descender figure 8	4	Unit	4	
	s	Jumar ascender	4	Unit	4	
	t	Tangga aluminium	1	Unit		1
	u	Chain Saw Kecil	1	Unit	1	1
	v	handspayer		unit		
	w	Gepyok/Flapper	5	Unit	5	
	x	Golok	10	Unit	5	5
	y	Angkong	3	Unit	2	1
	z	Alat deteksi mayat	1	Unit	1	
14		LOGISTIK				

	a	Peralatan dapur	1	Paket		
15	ALAT ALAT KERJA DAN PERSONAL USE TRC					
	a.	Sarung Tangan	30	Buah	30	
	b.	Kaca Mata Kerja	20	Buah		20
	c.	Kapak Kombinasi	10	Buah	2	8
	d.	Sekop Kecil	10	Buah	2	8
	e.	Sekop Besar	10	Buah	2	8
	f.	Vell Bed	50	Buah	20	30
	g.	Rompi	29	Buah	29	
	h.	Body hernes	6	Buah		6
	i.	Sleeping Bag	40	Buah	10	30
	j.	Kacamata (Google)	60	Buah		40
		Jumlah Sarana	847	Buah	455	392

2.3. Kinerja Pelayanan BPBD

Sebagai satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan kewenangan Bidang Bencana di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, BPBD dituntut untuk terus meningkatkan kinerja pelayanan dan mengkoordinasikan secara sistematis dan teknis keberadaannya serta terhadap peran dan fungsi yang diamanatkan, sehingga terwujud upaya penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.

Badan Penanggulangan Bencana dalam hal menjalankan peran sebagai koordinator penanggulangan bencana selalu berupaya menegaskan bahwa manajemen penanggulangan bencana bukanlah suatu kegiatan yang bersifat mendadak hanya untuk “tanggap darurat” bencana saja, akan tetapi meliputi berbagai aspek baik sebelum (pra bencana), pada saat bencana (tanggap darurat) dan setelah terjadinya bencana (pasca bencana) itu sendiri. Apabila diterapkan kedalam daur program kerja, maka penanggulangan bencana merupakan suatu siklus sistemik kegiatan kesiapsiagaan, identifikasi bahaya, analisa risiko, tindakan preventif, respon bencana, serta rehabilitasi dan rekonstruksi yang berkesinambungan melibatkan berbagai pihak (*stakeholders*) terkait, sesuai dengan ketentuan umum tahapan penanggulangan bencana yang telah disebutkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimum.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD

Tantangan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

1. Potensi bencana yang masih sulit diantisipasi
2. Pengetahuan terhadap Penanggulangan Bencana : Belum memadainya kapasitas SDM BPBD
3. Akuntabilitas : kurang yakinnya pemangku kepentingan terhadap peran dan kinerja BPBD

Sedangkan peluang dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut:

1. Informasi potensi bencana dapat diperoleh melalui informasi cuaca Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG).
2. Pengetahuan :
 - 1) Peningkatan kapasitas SDM penanggulangan bencana melalui diklat dan pembekalan.
 - 2) Masyarakat peduli terhadap isu-isu bencana
 - 3) Media yang memberikan berita-berita mengenai antisipasi kebencanaan
3. Akuntabilitas :
 - 1) Dipercaya menyalurkan dan bantuan bencana

Kinerja mulai diakui dengan pembentukan 1 pleton Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC-PB) sebanyak 54 orang.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPBD

Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat (BPBD) merupakan unsur pelaksana pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa daerah diberikan kewenangan untuk mengurus urusan pemerintahan konkuren yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintahan pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren inilah yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Kewenangan BPBD sesuai amanat undang-undang pemerintahan daerah adalah menangani urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dengan sub urusan bencana menangani urusan penanggulangan bencana kabupaten.

Sehubungan dengan hal tersebut, beberapa hal penting yang dapat dijadikan sebagai dasar bagi Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menentukan arah kebijakan yang berhubungan dengan pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu Menurunnya indeks resiko bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan, Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat menghadapi berbagai permasalahan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Adapun permasalahannya dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Membutuhkan waktu cukup lama untuk sampai ke lokasi bencana untuk wilayah diluar Kecamatan Tungkal Ilir (*respon time*).
2. Lambatnya informasi pengaduan kejadian bencana dari masyarakat yang diterima bagian layanan BPBD.
3. Tidak mudanya akses menuju lokasi kejadian bencana kebakaran hutan dan lahan.
4. Kurangnya sumber-sumber air digunakan untuk pemadaman.
5. Menjadi kebiasaan masyarakat membersihkan lahan dengan cara membakar.
6. Kurangnya frekuensi interaksi dan koordinasi antara BBD dengan kelompok masyarakat desa tangguh bencana.
7. Belum lengkapnya sarana dan prasarana untuk pelayanan kesiapsiagaan bencana.
8. Belum cukup sarana air “motor boat” untuk penanggulangan bencana banjir.

Tabel T-B.35

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Di Luar Kewenangan SKPD)	
Kapasitas dan Kapabilitas Sumber Daya Penanggulangan Bencana					Belum optimalnya kinerja dan pelayanan penanggulangan bencana
a. SDM	23 PNS 64 TRC 14 TKK	Jumlah Orang	a. Kemampuan personil	Peningkatan kapasitas SDM melalui diklat	

b. Anggaran	Ada (APBD/BNPB)	Rupiah	terbatas b. APBD	BNPB Dana Siap Pakai, APBN	
Kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana	Belum optimal		Jaringan komunikasi dan informasi kebencanaan dengan masyarakat	Keterlibatan stakeholder dan kepedulian masyarakat terhadap bencana	Kurang optimlanya penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat
Penguasaan Teknologi penanggulangan Bencana	Belum optimal	Unit	Pusat data dan informasi kebencanaan di BPBD	Ketersediaan software dan hardware pengolahan data dan informasi penanggulangan bencana	Belum tersedianya teknologi mutakhir kebencanaan
Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	Ada, belum lengkap	Jumlah kebutuhan sarpras	Markas Personil TRC-PB dan gudang penyimpanan peralatan	Alokasi anggran untuk penanggulangan bencana	- Belum adanya markas TRC-PB milik BPBD - Belum tersedianya gudang logistik peralatan penanggulanga n bencana
Pengurangan Resiko Bencana (mitigasi)	Belum ada Rencana Aksi Daerah (RAD) dan Pengurangan Resiko Bencana (PRB)	Jumlah aturan	Pembuatan RAD dan PRB	Peraturan Daerah RAD dan PRB	Belum optimalnya pelaksanaan RAD dan PRB
Pemulihan (rehabilitasi & rekonstruksi pasca bencana)	Belum optimal	Jumlah rehab dan rekon	- SDM penghitungan kerusakan/kerugian dampak bencana - Rencana pemulihan pasca bencana	Bantuan rehab dan rekon	Belum optimalnya pemulihan rehab dan rekon pasca bencana
Perubahan Iklim /Global Warming	Sumber data yang tersedia	Data iklim	Terbatasnya pengetahuan tentang iklim/cuaca	Informasi potensi bencana dari BMKG	Kurangnya Informasi dini potensi bencana

3.2 Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dengan mensinkronkan pada sasaran pokok sesuai dengan arah kebijakan pembangunan lima tahun periode 2025–2030 dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2025–2045 dan berdasarkan masalah–masalah utama yang sedang dihadapi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 4 (empat) tahun sesuai misi, diwujudkan dalam visi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2025– 2030 sebagai berikut :

“ B E R K A H M A D A N I ”

(*Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis Serta Mandiri dan ber-Inovasi*)

VISI :

“ *MEWUJUDKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH MADANI* “

Visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 menunjukkan arah pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH MADANI, adalah sebagai berikut:

a. Kabupaten Tanjung Jabung Barat **BERKAH** yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang **Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman, Harmonis**

- Tanjung Jabung Barat sebagai kabupaten yang **Berkualitas** ditandai dengan kinerja pemerintahan yang baik, pengelolaan sumberdaya alam yang efisiensi dan berkelanjutan, serta mampu mengembangkan sektor ekonomi kreatif
- Tanjung Jabung Barat sebagai kabupaten yang **Ekonomi Maju** ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan tinggi, pendapatan per kapita yang besar, tingkat pengangguran yang rendah, dan tingkat kemiskinan yang rendah serta berkembangnya diversifikasi ekonomi dengan berbagai sektor
- Tanjung Jabung Barat sebagai kabupaten yang **Religius** ditandai dengan meningkatnya pemahaman, pengamalan, dan pemeliharaan kerukunan dalam kehidupan beragama, serta meningkatnya semangat kebersamaan dalam masyarakat yang beriman dan bertaqwa
- Tanjung Jabung Barat sebagai kabupaten yang **Kompetitif** digambarkan dengan kemampuan untuk bersaing secara efektif dalam berbagai bidang yang didukung dengan keunggulan kompetitif dan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan
- Tanjung Jabung Barat sebagai kabupaten yang **Aman** ditunjukkan dengan rendahnya tingkat kejahatan, keamanan terhadap bencana alam yang terkendali, dan tingkat keamanan masyarakat umum yang rendah.
- Tanjung Jabung Barat sebagai kabupaten yang **Harmonis** ditandai dengan lingkungan masyarakat yang saling menghargai, mendukung, dan bekerja sama dengan baik, tanpa memandang latar belakang suku, agama, atau ras dan terciptanya suasana yang kondusif untuk pembangunan.

b. Kabupaten Tanjung Jabung Barat **MADANI** yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang **Mandiri dan BerInovasi**

- Tanjung Jabung Barat sebagai kabupaten yang **Mandiri** dicirikan dengan kemampuan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat secara mandiri, dan ketergantungan pada pemerintah pusat semakin berkurang.

- Tanjung Jabung Barat sebagai kabupaten yang **BerInovasi** ditunjukkan dengan meningkatnya penciptaan dan penerapan ide-ide baru untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pembangunan daerah, dan kesejahteraan masyarakat.

Misi :

Misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029

Misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah upaya-upaya yang akan dilaksanakan pemerintah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mewujudkan Visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat sampai dengan tahun 2029. Misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat harus memperhatikan Misi (Agenda) pembangunan yang tertuang dalam RPJMN tahun 2025-2029 yang tertuang dalam Asta Cita yaitu :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
4. Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

Untuk mencapai visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan 3 (tiga) Misi pembangunan daerah tahun 2025 – 2029 yaitu:

- 1. Berkah dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kondisi sosial yang tenteram, tertib, mantap dan inovatif**
- 2. Berkah dalam peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik**
- 3. Berkah dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan dari desa ke kota yang berkelanjutan**

Dari misi tersebut diatas, Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan tugas dan fungsi yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dapat merumuskan isu strategis pelayanan OPD yang mendukung visi dan misi tersebut sebagai berikut:

Misi 1 : Mewujudkan kondisi sosial yang tentram, tertib, dan harmonis serta mantap dan Inovatif
Dengan kondisi sosial yang tentram, tertib, dan harmonis serta mantap dan inovatif menjadikan rasa nyaman pada masyarakat untuk berktivitas, dan kondusif bagi investor untuk berinvestasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Selain itu kondisi harmonis tidak hanya sebatas antar umat beragama, kelompok, dan lapisan masyarakat tapi juga terjalin hubungan baik dengan dunia usaha, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten tetangga, dan pemerintah pusat.

Tujuan : Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan dan dicapai melalui sasaran. Dalam rumusannya tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah ini berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok lima tahunan keempat RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2025–2045 dan RPJPD Provinsi Jambi 2025–2045, dan mengacu pada tujuan dan sasaran pembangunan RPJMN 2025 – 2029.
Tujuan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025–2029 yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif.
2. Mewujudkan kondisi Masyarakat yang tenteram , tertib, inovatif dan memiliki daya tahan sosial
3. Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berintegritas dan adatif
4. Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan

Sasaran :

Sasaran Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Berdasarkan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka sasaran pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas dan pemerataan pendidikan
2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
3. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur
4. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat
5. Meningkatnya cakupan perlindungan sosial bagi kelompok rentan dan miskin
6. Meningkatnya pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya lokal
7. Meningkatnya budaya inovasi dan kreativitas daerah
8. Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan hak anak
9. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah
10. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat
11. Meningkatnya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
12. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah
13. Meningkatnya daya saing produk unggulan daerah
14. Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran
15. Meningkatnya kesetaraan akses infrastruktur antar wilayah
16. Meningkatnya kemandirian desa secara berkelanjutan

17. Meningkatkan ketahanan lingkungan

Dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung yang dirumuskan ke dalam program strategis berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu:

Program : ***Program Penanggulangan Bencana***

3.3. Telaahan Renstra BNPB dan Renstra BPBD Provinsi Jambi

RENSTRA PROVINSI BELUM ADA

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

RTRW yang berkaitan dengan BPBD (kawasan resiko bencana)

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPBD

Isu penting berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah mengenai Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*good governance*), dan Pelayanan Publik di daerah.

Analisis lingkungan strategis adalah suatu analisis yang dilaksanakan secara objektif dan komprehensif terhadap isu aktual dan faktor-faktor yang berpengaruh, baik yang berpengaruh secara langsung maupun secara tidak langsung terhadap kinerja instansi. Analisis lingkungan strategis diperlukan dalam penyusunan Renstra, agar Renstra yang disusun benar-benar berdasarkan data dan fakta yang ada, sehingga Renstra yang dibuat dapat menjadi pedoman bagi BPB dan menjadi komitmen bersama untuk mengatasi isu aktual yang berkembang.

Secara lebih rinci, isu-isu strategis berkaitan dengan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat disebutkan antara lain:

Faktor Lingkungan Internal

A. Kekuatan (S)

- 1) Mudahnya akses koordinasi vertikal dengan BPBD Provinsi dan BNPB;
- 2) Adanya komitmen pendanaan yang memadai dan fleksibel bagi upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kebakaran dari pos belanja tak terduga APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Dana Siap Pakai (DSP) APBN, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Usulan Prioritas Pembangunan Nasional (UPPN);
- 3) Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta secara aktif dalam penanggulangan bencana;
- 4) Adanya nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan yang masih relatif kuat dipegang oleh masyarakat.

B. Kelemahan (W)

- 1) Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;

- 2) Belum memadainya aturan yang mengatur penanggulangan bencana di daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, baik dalam bentuk Perda/Perkada, Rencana Aksi Daerah, Prosedur Tetap (PROTAP/SOP) yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Belum memadainya kinerja pelayanan dan kapabilitas sumberdaya aparatur dalam hal penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- 4) Belum optimalnya sinergisitas program dan kegiatan antar SKPD serta koordinasi lintas sektoral dan vertikal dalam hal pelaksanaan tahapan penanggulangan bencana.

Faktor Lingkungan Eksternal

A. Peluang (O)

- 1) Adanya komitmen dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- 2) Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang program dan kegiatan kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk pengurangan resiko bencana;
- 3) Adanya sinkronisasi dan koordinasi program dan kegiatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana (antar SKPD maupun antar wilayah);
- 4) Adanya peranserta masyarakat, relawan, Ormas dan LSM serta Dunia Usaha dalam upaya penanggulangan bencana.

B. Ancaman (T)

- 1) Adanya perubahan iklim global yang akan menambah intensitas bencana alam di semua wilayah;
- 2) Luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan bencana.

Berdasarkan hasil analisa lingkungan internal dan eksternal BPBD yang telah dilakukan, berikut ini adalah pilihan-pilihan strategis yang dapat diambil guna menentukan kebijakan-kebijakan sebagai bentuk antisipasi masa yang akan datang serta untuk perbaikan kondisi saat ini. Penggunaan strategi di bawah ini lebih bergantung dari cara pandang unit kerja dan unit organisasi dalam memandang setiap permasalahan yang dihadapi. Pilihan-pilihan strategi tersebut antara lain :

1. Strategi S-O, yaitu menggunakan kekuatan untuk mendapatkan peluang.

- 1) Peningkatan pendanaan baik APBD, APBN terhadap penanggulangan Bencana
- 2) Optimalisasi penanggulangan bencana dengan melibatkan seluruh stakeholder yang berbasis pada masyarakat.
- 3) Peningkatan teknologi tepat, cepat, efektif dan efisien penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- 4) Prioritas program dan kegiatan unggulan penanggulangan bencana
- 5) Pembangunan pusat data dan informasi bencana melalui pemanfaatan teknologi

2. Strategi W-O, yaitu mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang.

- 1) Peningkatan sarana dan prasarana penunjang penanggulangan bencana
- 2) Penerbitan Perda, PROTAP/SOP Penanggulangan Bencana
- 3) Peningkatan kapasitas SDM Penanggulangan Bencana
- 4) Upaya sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana

3. Strategi S-T, yaitu menggunakan kekuatan untuk menghindari ancaman.
- 1) Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dengan pengawasan peruntukan penggunaan lahan
 - 2) Peningkatan informasi dini potensi bencana
 - 3) Sosialisasi kepada masyarakat di daerah rawan bencana
4. Strategi W-T, yaitu meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman.
- 1) Peningkatan keterlibatan masyarakat dan seluruh stakeholder dalam hal kesiapsiagaan menghadapi bencana.
 - 2) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana
 - 3) Memadukan upaya-upaya penanganan dan pengurangan risiko bencana secara komprehensif dan sistematis dalam kebijakan dan program pembangunan daerah

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada telaah strategis dengan menggunakan instrumen matriks analisis SWOT berikut.

Tabel 3.2.
Matriks SWOT Faktor Internal dan Faktor Eksternal BPBD
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Internal Eksternal	<u>Kekuatan (strength)</u>	<u>Kelemahan (weakness)</u>
	1) Mudahnya akses koordinasi vertikal dengan BPBD Provinsi dan BNPB; 2) Adanya komitmen pendanaan yang memadai dan fleksibel bagi upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kebakaran dari pos belanja tak terduga APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Dana Siap Pakai (DSP) APBN, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan <u>Usulan Prioritas</u> Pembangunan Nasional (UPPN); 3) Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta secara aktif dalam penanggulangan bencana; 4) Adanya nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan yang masih relatif kuat dipegang oleh masyarakat	1) Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; 2) Belum memadainya aturan yang mengatur penanggulangan bencana di daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, baik dalam bentuk Perda/Perkada, Rencana Aksi Daerah, Prosedur Tetap (PROTAP/SOP) yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3) Belum memadainya kinerja pelayanan dan kapabilitas sumberdaya aparatur dalam hal penyelenggaraan penanggulangan bencana; 4) Belum optimalnya sinergisitas program dan kegiatan antar SKPD serta koordinasi lintas sektoral dan vertikal dalam hal pelaksanaan tahapan penanggulangan bencana.
<u>Peluang (opportunity)</u>	<u>Asumsi Strategi (S-O)</u>	<u>Asumsi Strategi (W-O)</u>
1) Adanya komitmen dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; 2) Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang program dan kegiatan kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk pengurangan resiko bencana; 3) Adanya sinkronisasi dan	1) Peningkatan pendanaan baik APBD, APBN terhadap penanggulangan Bencana 2) Optimalisasi penanggulangan bencana dengan melibatkan seluruh stakeholder yang berbasis pada masyarakat. 3) Peningkatan teknologi tepat, cepat, efektif dan efisien penyelenggaraan penanggulangan bencana. 4) Prioritas program dan kegiatan	1) Peningkatan sarana dan prasarana penunjang penanggulangan bencana 2) Penerbitan Perda, PROTAP/SOP Penanggulangan Bencana 3) Peningkatan kapasitas SDM Penanggulangan Bencana 4) Upaya sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan

koordinasi program dan kegiatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana (antar SKPD maupun antar wilayah); 4) Adanya peran serta masyarakat, relawan, Ormas dan LSM serta Dunia Usaha dalam upaya penanggulangan bencana.	unggulan penanggulangan bencana 5) Pembangunan pusat data dan informasi bencana melalui pemanfaatan teknologi	penanggulangan bencana
<u>Ancaman (threat)</u> 1) Adanya perubahan iklim global yang akan menambah intensitas bencana alam di semua wilayah; 2) Luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan bencana.	<u>Asumsi Strategi (S-T)</u> 1) Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dengan pengawasan peruntukan penggunaan lahan 2) Peningkatan informasi dini potensi bencana 3) Sosialisasi kepada masyarakat di daerah rawan bencana	<u>Asumsi Strategi (W-T)</u> 1) Peningkatan keterlibatan masyarakat dan seluruh stakeholder dalam hal kesiapsiagaan menghadapi bencana. 2) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya pengurangan resiko bencana 3) Memadukan upaya-upaya penanganan dan pengurangan risiko bencana secara komprehensif dan sistematis dalam kebijakan dan program pembangunan daerah

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD

Tujuan dan sasaran adalah merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Visi dan Misi Pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati daerah terpilih periode 2025-2029

Tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin raih dari masing-masing misi.

Dalam mewujudkan visi pembangunan yang ditetapkan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat periode 2025-2029, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2025-2029 yaitu :

“ B E R K A H M A D A N I ”

(Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis Mantap dan Inovatif)

Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan tugas dan fungsinya menetapkan **Visi** Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

“ TERWUJUDNYA LAYANAN PENANGGULANGAN BENCANA YANG TANGGUH DAN PROFESIONAL “.

Adapun makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah bahwa Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki peran dan tanggung jawab mengoptimalkan koordinasi dan secara profesional memberikan pelayanan penanggulangan bencana dengan mendorong upaya keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana serta membangun kesadaran masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana.

4.1.1 Tujuan

Untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah, Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut:

1. Melindungi masyarakat dari ancaman bencana serta dampak bencana;
2. Pelaksanaan tanggap darurat dalam penyelamatan dan evakuasi korban dan memberikan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar kepada masyarakat korban bencana;
3. Mengembangkan sumber daya aparatur penanggulangan bencana ;
4. Menyediakan sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang memadai;
5. Melaksanakan pemantauan dan penyebarluasan informasi dan budaya sadar bencana kepada masyarakat;
6. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan serta partisipasi seluruh stakeholder dan masyarakat dalam hal penanggulangan bencana;
7. Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan Instansi, berkaitan dengan bidang kebencanaan.

4.1.2 Sasaran

Sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat bagi terwujudnya tujuan yang telah dirumuskan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan 2025-2029 adalah:

1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana;
2. Meningkatnya penyelamatan, evakuasi korban dan penanganan pengungsi akibat bencana;
3. Terwujudnya sistem penanganan kedaruratan bencana yang efektif melalui, dan peningkatan sistem logistik;
4. Terselenggaranya rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah-wilayah bencana;
5. Terwujudnya desa siaga bencana;
6. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung.
7. Terwujudnya interaksi masyarakat dalam penanggulangan bencana
8. Meningkatnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan;
9. Terwujudnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana melalui peningkatan kapasitas fasilitasi di tingkat pusat dan daerah.
10. Peningkatan koordinasi penanganan kedaruratan,

Tabel T-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penanggulangan Bencana
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Terlindunginya masyarakat dari ancaman bencana	Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana	Indeks Resiko Bencana Kabupaten	96%	95%	94%	93%	92%	91%

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan

Sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka mewujudkan upaya penyelenggaraan layanan penanggulangan bencana, sangat diperlukan suatu rencana strategis penanggulangan bencana yang berkualitas serta kebijakan lainnya yang akan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, maka strategi dan kebijakan yang akan dilakukan dalam 5 (lima) tahun ke depan 2025-2029 adalah sebagai berikut:

5.1.1 Strategi yang akan dilaksanakan

- 1) Menyediakan Sumber daya aparatur yang bersertifikat, handal dan terlatih dalam penanggulangan bencana;
- 2) Kaji cepat dan kaji tepat penanggulangan bencana
- 3) Mengadakan/membeli sarana dan prasarana penanggulangan bencana baik melalui dana APBD maupun APBN serta membuat proposal permohonan bantuan Sarpras ke BNPB;
- 4) Memfasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana;
- 5) Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Bencana di tingkat Kabupaten;

5.1.2 Kebijakan yang akan dilaksanakan

- 1) Mengikutsertakan SDM bimbingan teknis dan pelatihan-pelatihan penanggulangan bencana
- 2) Mengembangkan SDM berbasis kompetensi;
- 3) Mengembangkan sarana dan prasarana berbasis kebutuhan;
- 4) Memprioritaskan pemberdayaan masyarakat di wilayah berisiko rawan bencana;
- 5) Penerbitan SK Bupati Tim Koordinasi Penanggulangan Bencana tingkat Kabupaten
- 6) Penanggulangan bencana yang terencana, terarah, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh serta akuntabel.
- 7) Memberikan bantuan kepada masyarakat korban bencana sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel T-C..26.1

Strategi “ Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat

VISI : “ Terwujudnya layanan Penanggulangan Bencana yang Tangguh dan Profesional “			
MISI 1 : Mewujudkan Berkah dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kondisi sosial yang tenteram, tertib, mantap dan inovatif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Melindungi masyarakat dari ancaman bencana serta dampak	- Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana	- Kaji cepat dan kaji tepat penanggulangan	1. Memberikan bantuan kepada masyarakat korban bencana sesuai prosedur dan peraturan perundang- uandangan yang

bencana		bencana	berlaku.
2. Pelaksanaan tanggap darurat dalam penyelamatan dan evakuasi korban dan memberikan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar kepada masyarakat korban bencana	- Meningkatnya penyelamatan, evakuasi korban dan penanganan pengungsi akibat bencana - Terwujudnya sistem penanganan kedaruratan bencana yang efektif melalui, dan peningkatan sistem logistik. - Terselenggaranya rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah-wilayah bencana		
3. Mengembangkan sumber daya aparatur penanggulangan bencana	- Terwujudnya desa siaga bencana	- Menyediakan sumber daya aparatur yang bersertifikat, handal dan terlatih dalam penanggulangan bencana	1. Mengikutsertakan SDM bimbingan teknis dan pelatihan-pelatihan penanggulangan bencana 2. Mengembangkan SDM berbasis kompetensi.
4. Menyediakan sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang memadai	- Peningkatan sarana dan prasarana pendukung	- Mengadakan/membeli sarana dan prasarana penanggulangan bencana baik melalui dana APBD maupun APBN serta membuat proposal permohonan bantuan Sarpras ke BNPB	1. Mengembangkan sarana dan prasarana berbasis kebutuhan.
5. Melaksanakan pemantauan dan penyebarluasan informasi dan budaya sadar bencana kepada masyarakat	- Terwujudnya interaksi masyarakat dalam penanggulangan bencana - Meningkatnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan	-	-

6. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan serta partisipasi seluruh masyarakat dalam hal penanggulangan bencana.	- Terwujudnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana melalui peningkatan kapasitas fasilitasi di tingkat pusat dan daerah	- Memfasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana	1. Memprioritaskan pemberdayaan masyarakat di wilayah berisiko rawan bencana.
7. Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan Instansi terkait serta berkaitan dengan bidang kebencanaan	- Peningkatan koordinasi penanganan kedaruratan	- Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Bencana di tingkat Kabupaten	1. Penerbitan SK Bupati Tim Koordinasi Penanggulangan Bencana tingkat Kabupaten. 2. Penanggulangan Bencana yang terencana, terarah, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh serta akuntabel.

Tabel V.26.2

Strategi “ TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH MADANI”
Tanjung Jabung Barat yang “Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman, Harmonis, Mandiri dan ber-Inovasi”

VISI : “ Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman, Harmonis, Mandiri dan Ber-Inovasi			
MISI 1 : Berkah dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kondisi sosial yang tenteram, tertib, mantap dan inovatif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Kondisi Masyarakat Yang Tentram, Tertib, Inovatif dan Memiliki Daya Tahan Sosial	Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat	Penguatan system peringatan dini (Early Warning System)	Peningkatan Kapasitas Monitoring dan Pemantauan Potensi Bencana
		Optimalisasi Koordinasi Lintas Sektor	1. Penyusunan Rencana Kontijensi Terpadu Lintas Sektor 2. Penguatan Forum Koordinasi Penanggulangan Bencana

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Rumusan Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan

Rencana strategis Perubahan merupakan cara untuk dapat mencapai suatu tujuan dan sasaran pembangunan yang mengandung komitmen kebijakan yang menunjukkan arah kebijakan, program dan kegiatan yang diterapkan untuk mencapai sasaran kinerja yang terukur.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi penanggulangan bencana, Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan program sesuai RPJMD 2021-2026 berupa program utama (teknis) dan program pendukung (generik). Program utama ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas utama Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam proses kesiapsiagaan, identifikasi bahaya, analisa resiko, tindakan preventif, respon bencana, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Sedangkan program pendukung (generik) digunakan oleh semua Perangkat Daerah baik seluruh program maupun sebagian dari program, karena bersifat generik (dapat digunakan semua Perangkat Daerah) maka program tersebut tidak dapat mencerminkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, peran dan kewenangan Badan Penanggulangan Bencana, sehingga menyulitkan pengukuran kinerjanya. Adapun program-program tersebut adalah sebagai berikut:

I. Program Utama (teknis)

Program Penanggulangan Bencana (1.05.03)

Kegiatan (1.05.03.2.01):

1) Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan (1.05.03.2.01.):

- (01) Sosialisasi, Komunikasi , Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten /Kota (Per Jenis Bencana)
- (02) Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/ Kota

Kegiatan (1.05.03.2.02.):

2) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

Sub Kegiatan (1.05.03.2.02.) :

- (01) Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota
- (02) Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
- (03) Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
- (04) Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
- (05) Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
- (06) Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
- (07) Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota
- (08) Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
- (09) Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota

(10) Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota

(11) Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota

3) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Sub Kegiatan (1.05.03.2.03..) :

(01) Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas

(02) Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota

(03) Pencarian Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota

(04) Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota

(05) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam Penanganan Keadaan Darurat Kabupaten/Kota

(06) Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota

(07) Respon Cepat Bencana Alam Epidemi/Wabah Penyakit

(08) Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana

Kegiatan (1.05.03.2.04.) :

4) Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

Sub Kegiatan (1.05.03.2.04.):

(01) Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota

(02) Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota

(03) Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/kota

(04) Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota

(05) Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)Kab/Kota

(06) Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota

II. Program Pendukung (generik)

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (1.05.01).

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja erangkat Daerah

Rekening Kegiatan (1.05.01.2.01.) :

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Rekening Kegiatan (1.05.01.2.02.) :

3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Rekening Kegiatan (1.05.01.2.03.) :

4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Rekening Kegiatan (1.05,01.2.04)

5) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Rekening Kegiatan (1.05.01.2.05.) :

6) Administrasi Umum Perangkat Daerah

Rekening Kegiatan (1.05.01.2.06.) :

7) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Rekening Kegiatan (1.05.01.2.07.) :

8) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Rekening Kegiatan (1.05.01.2.08.) :

9) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Rekening Kegiatan (1.05.01.2.09.) :

10) Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung atau Bangunan Lainnya

Rekening Kegiatan (1.05.01.2.11):

Secara rinci rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada lampiran.

Tabel T-C.27 SESUAI DENGAN PERMENDAGRI 240115-1350 TAHUN 2024

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Cakupan Penanggulangan Bencana									
1.1	Indeks Risiko Bencana Kabupaten	Persen	100	96 %	95 %	94 %	93 %	92 %	91 %	100 %
1.2	Jumlah Jenis Potensi Bencana Kabupaten	Jenis Bencana	5	5	5	5	5	5	5	5

Tabel T-C. 23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	10	11	12	13	14	14	15	16	17
1	Persentase Ketersediaan Informasi Rawan Bencana Kabupaten	-	-		486.081.200	534.689.320	-----	-----	-----	53.100.000		-----	-----	-----	100 %	100%			
2	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	-		1.345.641.000	1.730.205.100	-----	-----	-----	42.388.000		-----	-----	-----	100%	82%			
3	Persentase Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	-		3.125.188.000	3.437.706.800	-----	-----	-----	1.638.711.000		-----	-----	-----	99%	99%			
4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-	-		1.243.154.000	1.367.469.400	-----	-----	-----	-----				-----	-----	-----			
5	Persentase Penyediaan Logistik Korban Bencana	-	-		100%	100%	-----	-----	-----	100 %		-----	-----	-----	100%	100%			
6	Tersedianya Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-	-		100%	100%	-----	-----	-----	100 %		-----	-----	-----	100%	100%			
7	Indeks Resiko Bencana Kabupaten dan Jumlah Jenis Potensi Bencana Kabupaten	-	-		6.200.064.200	7.070.070.620	2.88	2.551.00 1.500	2.474.97 0.000		-----	2.66 9.44 8.00 0	2.22 4.54 0.00 0	2.136.9 96.000	----	----	92%	87%	86%

NO	INDIKATOR	SATUAN	STATUS	TARGET AWAL	TARGET					MODUL	KODE SKPD	SUMBER	TIPE DATA	CATATAN
					2026	2027	2028	2029	2030					
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1,	Indeks Risiko Bencana	Indeks	negatif	97	95	94	93	92	91	SASARAN	1.05.0.00.0.00.04.0000	OUTCOME	numeric	

CATATAN :
 INDIKATOR KINERJA UTAMA RANCANGAN AKHIR RENSTRA PERIODE 2026 – 2030
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
 PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

No	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	2025		2026		2027		2028		2029	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1,	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Desa/ Kelurahan	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134
2,	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Desa/ Kelurahan	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134

CATATAN : Indikator Kinerja Kunci Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)Tahun 2025-2029 Kabupaten Tanjung Jabung Barat

NO	URAI SASARAN	CATATAN
(1)	(2)	(3)
1	Peningkatan kapasitas penanggulangan bencana	

CATATAN : URAIAN SASARAN

NO	TUJUAN	BIDANG	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					CATATAN
					2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	08)	(09)	(10)	(11)
1,	Terlindungnya masyarakat dari ancaman bencana	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								

CATATAN : CATATAN INDIKATOR TUJUAN RANCANGAN AKHIR RENSTRA PERIODE 2026 - 2030 (BPBD) KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NO	KODE	URAI	PAGU					CATATAN
			2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)
1,	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	66.704.310	80.045.172	96.054.206	115.265.048	138.318.057	
2,	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.852.698.514	5.823.238.216	6.987.885.860	8.385.463.032	10.062.555.638	
3,	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	11.180.400	13.416.480	16.099.776	19.319.731	23.183.677	
4,	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	376.939.200	452.327.040	542.792.448	651.350.938	781.621.125	
5,	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	585.373.800	702.448.560	842.938.272	1.011.525.927	1.213.831.112	
6,	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	313.051.200	375.661.440	1.301.493.728	540.952.474	649.142.968	
7,	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.718.551.400	3.262.261.680	3.914.714.016	4.697.656.819	5.637.188.183	
8,	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.307.308.200	1.568.769.840	1.882.523.808	2.259.028.568	2.710.834.284	
9,	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	231.913.440	878.296.128	333.955.354	400.746.424	480.895.709	
10,	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.439.077.200	2.326.892.640	2.375.866.944	2.486.725.402	2.984.070.482	
11,	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.432.832.400	1.719.398.880	2.063.278.656	2.779.531.163	2.971.121.265	
12,	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	971.896.200	1.535.228.640	1.849.530.528	1.679.436.634	2.015.323.960	

CATATAN :
 KEGIATAN (BPBD) KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NO	KODE	URAI KEGIATAN	OUTPUT	PAGU					CATATAN
				2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
1,	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya kualitas dokumen perencanaan dan laporan kinerja perangkat daerah	66.704.310	80.045.172	96.054.206	115.265.048	138.318.057	
2,	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya laporan keuangan Tahunan OPD	4.852.698.514	5.823.238.216	6.987.885.860	8.385.463.032	10.062.555.638	
3,	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	11.180.400	13.416.480	16.099.776	19.319.731	23.183.677	
4,	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kepegawaian Perangkat Daerah	376.939.200	452.327.040	542.792.448	651.350.938	781.621.125	
5,	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Umum Perangkat Daerah	585.373.800	702.448.560	842.938.272	1.011.525.927	1.213.831.112	
6,	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	313.051.200	375.661.440	1.301.493.728	540.952.474	649.142.968	
7,	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	2.718.551.400	3.262.261.680	3.914.714.016	4.697.656.819	5.637.188.183	
8,	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	1.307.308.200	1.568.769.840	1.882.523.808	2.259.028.568	2.710.834.284	
9,	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Meningkatnya Informasi Rawan Bencana Kabupaten	231.913.440	878.296.128	333.955.354	400.746.424	480.895.709	
10,	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Meningkatnya Pelayanan Pencegahan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.439.077.200	2.326.892.640	2.375.866.944	2.486.725.402	2.984.070.482	
11,	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana pada kondisi darurat	1.432.832.400	1.719.398.880	2.063.278.656	2.779.531.163	2.971.121.265	
12,	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Pelaksanaan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	971.896.200	1.535.228.640	1.849.530.528	1.679.436.634	2.015.323.960	

CATATAN :
 KEGIATAN OUTPUT RANCANGAN AKHIR RENSTRA PERIODE 2026 - 2030 (BPBD)
 KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

CATATAN PROGRAM INDIKATOR RANCANGAN AKHIR RENSTRA PERIODE 2026 - 2030 PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG		OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU										CATATAN
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)		(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terselenggaranya Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah dan Pelayanan yang Efisiensi dan Efektivitas (BPBD)	Angka	86,4	10.231.807.024	86,41	12.278.168.428	86,42	15.584.502.114	86,43	17.680.562.537	86,44	21.216.675.044		
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	63	10.231.807.024	64	12.278.168.428	65	15.584.502.114	66	17.680.562.537	67	21.216.675.044		
		Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B	%	78,63	10.231.807.024	78,64	12.278.168.428	78,65	15.584.502.114	78,66	17.680.562.537	78,67	21.216.675.044		
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Meningkatnya kualitas layanan penegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	*	100	4.075.719.240	100	6.459.816.288	100	6.622.631.482	100	7.346.439.623	100	8.451.411.416		

CATATAN:
PROGRAM INDIKATOR RANCANGAN AKHIR RENSTRA PERIODE 2026 - 2030 (BPBD)
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

KODE PROGRAM	PROGRAM	OUTCOME	PAGU VALIDASI					CATATAN
			2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terselenggaranya Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah dan Pelayanan yang Efisiensi dan Efektivitas (BPBD)	10.231.807.024	12.278.168.428	15.584.502.114	17.680.562.537	21.216.675.044	
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Meningkatnya kapasitas penanggulangan bencana kabupaten	4.075.719.240	6.459.816.288	6.622.631.482	7.346.439.623	8.451.411.416	

CATATAN :
PROGRAM OUTCOME RANCANGAN AKHIR RENSTRA PERIODE 2026 - 2030 (BPBD)
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NO	KODE	URAI	PAGU					CATATAN
			2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)
1,	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22.640.310	27.168.372	32.602.046	39.122.456	46.946.949	
2,	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.344.000	8.812.800	10.575.360	12.690.432	15.228.518	

3,	1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.344.000	8.812.800	10.575.360	12.690.432	15.228.518	
4,	1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.344.000	8.812.800	10.575.360	12.690.432	15.228.518	
5,	1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	7.344.000	8.812.800	10.575.360	12.690.432	15.228.518	
6,	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.344.000	8.812.800	10.575.360	12.690.432	15.228.518	
7,	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.344.000	8.812.800	10.575.360	12.690.432	15.228.518	
8,	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.673.812.114	5.608.574.536	6.730.289.444	8.076.347.332	9.691.616.798	
9,	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	167.706.000	201.247.200	241.496.640	289.795.968	347.755.162	
10,	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.590.200	6.708.240	8.049.888	9.659.866	11.591.839	
11,	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.590.200	6.708.240	8.049.888	9.659.866	11.591.839	
12,	1.05.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5.590.200	6.708.240	8.049.888	9.659.865	11.591.838	
13,	1.05.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.590.200	6.708.240	8.049.888	9.659.866	11.591.839	
14,	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	351.384.000	421.660.800	505.992.960	607.191.552	728.629.862	
15,	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25.555.200	30.666.240	36.799.488	44.159.386	52.991.263	
16,	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.180.400	13.416.480	16.099.776	19.319.731	23.183.677	
17,	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	73.471.200	88.165.440	105.798.528	126.958.234	152.349.880	
18,	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.590.200	6.708.240	8.049.888	9.659.866	11.591.839	
19,	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.986.000	9.583.200	11.499.840	13.799.808	16.559.770	
20,	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.986.000	9.583.200	11.499.840	13.799.808	16.559.770	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	8) (0	(09)
21,	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	479.160.000	574.992.000	689.990.400	827.988.480	993.586.176	
22,	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0	850.700.000	0	0	
23,	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	207.636.000	249.163.200	298.995.840	358.795.008	430.554.010	
24,	1.05.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	105.415.200	126.498.240	151.797.888	182.157.466	218.588.958	

		atau Bangunan Lainnya						
25,	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.763.600	24.916.320	29.899.584	35.879.501	43.055.401	
26,	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	134.164.800	160.997.760	193.197.312	231.836.774	278.204.129	
27,	1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	79.860.000	95.832.000	114.998.400	137.998.080	165.597.696	
28,	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.483.763.000	2.980.515.600	3.576.618.720	4.291.942.464	5.150.330.957	
29,	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	239.580.000	287.496.000	344.995.200	413.994.240	496.793.088	
30,	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	399.300.000	479.160.000	574.992.000	689.990.400	827.988.480	
31,	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	239.580.000	287.496.000	344.995.200	413.994.240	496.793.088	
32,	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	364.960.200	437.952.240	525.542.688	630.651.226	756.781.471	
33,	1.05.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	63.888.000	76.665.600	91.998.720	110.398.462	132.478.157	
34,	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	231.913.440	278.296.128	333.955.354	400.746.424	480.895.709	
35,	1.05.03.2.01.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	0	600.000.000	0	0	0	
36,	1.05.03.2.02.0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	158.122.800	189.747.360	227.696.832	273.236.198	327.883.438	
37,	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	191.664.000	229.996.800	275.996.160	331.195.392	397.434.471	
38,	1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	52.707.600	63.249.120	75.898.944	91.078.733	109.294.480	
39,	1.05.03.2.02.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	52.707.600	63.249.120	75.898.944	91.078.733	109.294.480	
40,	1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	351.384.000	421.660.800	505.992.960	607.191.552	728.629.862	
41,	1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	210.830.400	252.996.480	303.595.776	364.314.932	437.177.917	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)
42,	1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	0	360.000.000	0	0	0	

43,	1.05.03.2.02.0023	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	0	0	303.595.776	0	0	
44,	1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	210.830.400	252.996.480	303.595.776	364.314.931	437.177.917	
45,	1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	0	240.000.000	0	0	0	
46,	1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	210.830.400	252.996.480	303.595.776	364.314.931	437.177.917	
47,	1.05.03.2.03.0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	263.538.000	316.245.600	379.494.720	455.393.664	546.472.397	
48,	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	258.890.400	310.668.480	372.802.176	447.362.611	536.835.133	
49,	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	260.343.600	312.412.320	374.894.784	449.873.741	539.848.490	
50,	1.05.03.2.03.0007	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	52.707.600	63.249.120	75.898.944	91.078.733	109.294.479	
51,	1.05.03.2.03.0008	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	263.538.000	316.245.600	379.494.720	455.393.664	546.472.397	
52,	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	158.122.800	189.747.360	227.696.832	273.236.198	327.883.438	
53,	1.05.03.2.03.0010	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	0	0	0	303.596.776	0	
54,	1.05.03.2.03.0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	175.692.000	210.830.400	252.996.480	303.595.776	364.314.931	
55,	1.05.03.2.04.0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	0	0	450.000.000	0	0	
56,	1.05.03.2.04.0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	0	368.953.200	0	0	0	
57,	1.05.03.2.04.0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	261.940.800	314.328.960	377.194.752	452.633.702	543.160.442	
58,	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	307.461.000	368.953.200	442.743.840	531.292.608	637.551.130	
59,	1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	201.247.200	241.496.640	289.795.968	347.755.162	417.306.194	

60,	1.05.03.2.04.0016	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	201.247.200	241.496.640	289.795.968	347.755.162	417.306.194	
-----	-------------------	---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

CATATAN :
SUBKEGIATAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PERIODE 2026 - 2030 PEMERINTAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam kinerja penyelenggaraan bidang urusan tersebut Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana serta penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.

Adapun pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan bidang urusan mempunyai indikator kinerja individu (IKI) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang secara langsung menunjuk kriteria yang akan dicapai 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2025-2029.

Untuk lebih rinci uraian indikator kinerja individu (IKI) beserta kinerja, indikator kinerja dan penjelasan formulasi perhitungan capaian setiap tahun sampai akhir periode RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat dalam tabel di bawah ini sbb:

1. Indikator Kinerja Individu Kepala Pelaksana
2. Indikator Kinerja Individu Sekretasi
3. Indikator Kinerja Individu Kabid Kesiapsiagaan, Sarana dan Prasarana
4. Indikator Kinerja Individu Kabid Bencana dan Rehabilitasi
5. Indikator Kinerja Individu Kasubbag Kepegawaian dan Umum
6. Indikator Kinerja Individu Kasubbag Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
7. Indikator Kinerja Individu Kasubbag Keuangan
8. Indikator Kinerja Individu Kasubbid Rehabilitasi dan Rekonstruksi
9. Indikator Kinerja Individu Kasubbid Kesiapsiagaan
10. Indikator Kinerja Individu Kasubbid Sarana dan Prasarana
11. Indikator Kinerja Individu Kasubbid Penanggulangan Bencana

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

1. JABATAN : KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
2. TUGAS : Kepala Pelaksana yang membantu Kepala Badan Penanggulangan Bencana dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana dalam menjalankan tugas sehari-hari, Kepala Pelaksana berada dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD.
3. FUNGSI :
 - 1) Pelaksanaan penyiapan perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana;
 - 2) Pelaksanaan fungsi koordinasi, pengkomandoan dan pelaksanaan di bidang penanggulangan bencana;
 - 3) Pelaksanaan penetapan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - 4) Pelaksanaan penyusunan, penetapan dan penginformasikan peta rawan bencana;
 - 5) Pelaksanaan penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanggulangan bencana;
 - 6) Pelaksanaan pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - 7) Pelaksanaan pengendalian, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - 8) Pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerahnya;
 - 9) Pelaksanaan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pemerintah Pusat;
 - 10) Pelaksanaan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Menurunnya Indeks Risiko Bencana Kabupaten	1. Cakupan Penanggulangan Bencana	Jumlah kejadian bencana yang dapat ditangani X 100 %	Bidang Bencana dan Rahabilitasi
	2. Cakupan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana WMK (Wilayah Manajemen Kebencanaan)	Jumlah kejadian bencana di kabupaten X 100 %	Bidang Kesiapsiagaan Sarana dan Prasaran
		Jumlah sarana dan prasarana yang data direhab X	
		Jumlah seluruh kerusakan sarana dan prasarana 100 %	Bidang Srekrariat
		Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan	
	3. Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran dalam 1 tahun yang direncanakan	

	Kabupaten /Kota		
--	-----------------	--	--

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

1. JABATAN : SEKRETARIS
2. TUGAS : Membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap terhadapa program, administrasi dan sumber daya serta kerjasama.
3. FUNGSI :
 - 1) Pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi program perencana dan perumusan kebijakan dilingkungan BPBD;
 - 2) Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga;
 - 3) Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler;
 - 4) Fasilitasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unsur pengarah BPBD;
 - 5) Pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya;
 - 6) Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Internal Instansi dan SDM Kebencanaan.	Cakupan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Dokumen yang direncanakan ; ➤ Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. ➤ Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. ➤ Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah. ➤ Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ➤ Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah ➤ Jumlah Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ➤ Jumlah Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bidang Srekrariat

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

1. JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
2. TUGAS : Membantu Sekretaris untuk merencanakan, menyusun program, melaksanakan monitoring, evaluasi serta pelaporan terhadap program kegiatan BPBD.
3. FUNGSI :
 - 1) Penyusunan rencana dan program kerja tahunan BPBD;
 - 2) Penyiapan penyusunan rencana, pengawasan dan pengembangan sistem dan koordinasi pelaksanaan program bidang BPBD;
 - 3) Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan;
 - 4) Pengumpulan dan penganalisis data pelaksanaan program kegiatan;
 - 5) Pelaksanaan pendataan akibat bencana;
 - 6) Pelaksanaan penyusunan kebutuhan rehabilitasi, pasca bencana;
 - 7) Pelaksanaan monitoring terhadap kegiatan di bidang BPBD;
 - 8) Pelaksanaan evaluasi terhadap kegiatan BPBD;
 - 9) Penyusunan laporan kegiatan BPBD, yang mencakup Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan BPBD;

10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Tertibnya Administrasi Perkantoran.	Jumlah Dokumen Perencanaan ; ➤ Jumlah Dokumen Renstra ➤ Jumlah Dokumen Renja ➤ Jumlah Dokumen RKA ➤ Jumlah Dokumen DPA ➤ Jumlah Dokumen LAKIP ➤ Jumlah Dokumen LPPK OPD ➤ Jumlah Dokumen LKPJ OPD ➤ Jumlah Dokumen LPPD OPD ➤ Jumlah Dokumen Evaluasi Renstra ➤ Jumlah dokumen evaluasi Renja	Jumlah dokumen yang disusun ; ➤ Jumlah Dokumen Renstra yang tersusun ➤ Jumlah Dokumen Renja yang tersusun ➤ Jumlah Dokumen RKA yang tersusun ➤ Jumlah Dokumen DPA yang tersusun ➤ Jumlah Dokumen LAKIP yang tersusun ➤ Jumlah Dokumen LPPK OPD yang tersusun ➤ Jumlah Dokumen LKPJ OPD yang tersusun ➤ Jumlah Dokumen LPPD OPD yang tersusun ➤ Jumlah Dokumen evaluasi Renstra yang tersusun ➤ Jumlah Dokumen evaluasi Renja yang tersusun	Subbag Monev

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

1. JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
2. TUGAS : Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. FUNGSI :
 - 1) Penyusunan rencana anggaran belanja BPBD;
 - 2) Penyiapan rencana kebutuhan dan penggunaan biaya rutin dan biaya perjalanan dinas serta merencanakan kebutuhan biaya BPBD;
 - 3) Pelaksanaan pemeliharaan arsip dan dokumentasi keuangan dilingkungan BPBD dan melaporkan serta mempertanggung jawabkan kepada atasan;
 - 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
-------------------	-------------------	-----------------------------------	-------------

Tertibnya Administrasi Perkantoran	Cakupan Laporan Keuangan Tahunan OPD : ➤ Jumlah ASN yang bibayarkan Honorarium ➤ Jumlah Laporan Keuangan Akhrit Tahun OPD ➤ Jumlah Laporan Keuangan Bulanan ➤ Jumlah Laporan Keuangan Triwulan ➤ Jumlah Laporan Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun : ➤ Jumlah ASN yang bibayarkan Honorarium tersusun ➤ Jumlah Laporan Keuangan Akhrit Tahun OPD tersusun ➤ Jumlah Laporan Keuangan Bulanan tersusun ➤ Jumlah Laporan Keuangan Triwulan tersusun ➤ Jumlah Laporan Semesteran tersusun	Subbag Keuangan
------------------------------------	--	---	-----------------

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

1. JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM
2. TUGAS : Melakukan, surat menyurat, arsip, administrasi ketatausahaan dan urusan perlengkapan, kehumasan dan keprotokolan.
3. FUNGSI :
 - 1) Pelaksanaan pendataan, perencanaan, koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sosialisasi bidang BPBD;
 - 2) Pelaksanaan administrasi surat masuk dan surat keluar serta perencanaan rapat-rapat dan penerimaan tamu serta perencanaan evaluasi tentang organisasi dan ketatausahaan BPBD;
 - 3) Pelaksanaan pengelolaan urusan perlengkapan;
 - 4) Pelaksanaan pengelolaan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
 - 5) Pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan Subbag Kepegawaian dan Umum;
 - 6) Pelaksanaan pemeliharaan dan pengelolaan inventaris milik Negara dan daerah yang dikelola BPBD;
 - 7) Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian Unsur Pelaksana BPBD;
 - 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Tertibnya Administrasi Perkantoran.	Cakupan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran; 1. Jumlah Kartu Inventaris 2. Tingkat Kehadiran Pegawai / ASN 3. Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran 4. Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5. Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Cakupan Laporan Administrasi yang tersusun ; 1. Jumlah Laporan Kartu Inventaris 2. Persentase Laporan Kehadiran Pegawai/ ASN 3. Persentase Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran. 4. Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5. Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Subbag Kepegawaian dan Umum

	6. Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	6. Jumlah Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
--	---	---	--

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

1. JABATAN : KEPALA BIDANG KESIAPSIAGAAN SARANA DAN PRASARANA
2. TUGAS : Membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, peringatan dini, mitigasi, kesiapsiagaan pra bencana dan kegiatan sarana dan prasarana.
3. FUNGSI :
 - 1) Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan, peringatan dini, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana;
 - 2) Perumusan kebijakan dan strategi pencegahan, peringatan dini, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
 - 3) Penyusunan rencana kerja dan program pencegahan, peringatan dini, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
 - 4) Pengkajian dan analisis kemungkinan dampak bencana;
 - 5) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - 6) Penyusunan perumusan kebijakan semua program dan kegiatan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam lingkup perlengkapan sarana dan prasarana penunjang penanganan bencana;
 - 7) Penyusunan kebijakan rencana kebutuhan dan perlengkapan sarana dan prasarana BPBD;
 - 8) Pelaksanaan pengkoordinasian dalam rangka pengadaan sarana dan prasarana;
 - 9) Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dibidang pencegahan, peringatan dini, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - 10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
-------------------	-------------------	-----------------------------------	-------------

➤ Meningkatnya Informasi Rawan Bencana Kabupaten	1. Persentase Ketersediaan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah penduduk yang memperoleh layanan informasi rawan bencana.	Kabid Kesiapsiagaan Sarana dan Prasarana
➤ Meningkatnya Pelayanan Pencegahan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	2. Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.	

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

1. JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN KESIAPSIAGAAN
2. TUGAS : Melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Kesiapsiagaan, Sarana dan Prasarana dalam penyusunan kebijakan, pengkoordinasian, hubungan kerja, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesiapsiagaan.
3. FUNGSI :
 - 1) Pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan dan strategi pencegahan, dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
 - 2) Pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan dan strategi pencegahan, dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
 - 3) Pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan program pencegahan, kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
 - 4) Penyiapan bahan kajian dan analisis kemungkinan dampak bencana;
 - 5) Penyiapan bahan kajian pengurangan risiko bencana;
 - 6) Pelaksanaan pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - 7) Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dibidang pencegahan, dan kesiapsiagaan prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - 8) Penetapan rencana lokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia;
 - 9) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan dibidang kesiapsiagaan prabencana;
 - 10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya Pelayanan Pencegahan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1. Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kabid Kesiapsiagaan Sarana dan Prasarana

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

1. JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN SARANA DAN PRASARANA
2. TUGAS : Melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Kesiapsiagaan, Sarana dan Prasarana dalam penyusunan kebijakan, pengkoordinasian, hubungan kerja, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Sarana dan Prasarana.
3. FUNGSI :
 - 1) Penyusunan rencana kegiatan BPBD serta rencana kebutuhan dan perlengkapan BPBD;
 - 2) Penyusunan rencana kegiatan BPBD serta rencana kebutuhan dan perlengkapan BPBD;
 - 3) Pelaksanaan perencanaan pengadaan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan penanganan bencana;
 - 4) Pelaksanaan pengecekan, perbaikan serta pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - 5) Pelaksanaan penyelenggaraan administrasi penerimaan dan pengeluaran sarana dan prasarana BPBD;
 - 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya Informasi Rawan Bencana Kabupaten	1. Persentase Ketersediaan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk di Daerah Rawan Bencana yang memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	Kabid Kesiapsiagaan Sarana dan Prasarana

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

1. JABATAN : KEPALA BIDANG BENCANA DAN REHABILITASI
2. TUGAS : Membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana, dan rehabilitasi pada pasca bencana serta menyusun prosedur tetap tanggap darurat bencana.
3. FUNGSI :
 - 1) Perumusan kebijakan dan strategi bidang penanggulangan bencana dan rehabilitasi pasca bencana;
 - 2) Perumusan kebijakan dan petunjuk teknis operasional dibidang penanggulangan bencana dan rehabilitasi pasca bencana;
 - 3) Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana dan rehabilitasi pasca bencana;
 - 4) Pelaksanaan hubungan kerja dibidang penanggulangan bencana dan bidang rehabilitasi pasca bencana;
 - 5) Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana dan bidang rehabilitasi pasca bencana;
 - 6) Pelaksanaan Pengkoordinasian Penyuluhan dan Pelatihan tentang mekanisme Tanggap Darurat;
 - 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
➤ Meningkatkan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana pada kondisi Darurat. ➤ Pelaksanaan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1. Persentase Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 2. Tersedianya Sistem Dasar Penanggulanga n Bencana	- Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban bencana dan dampak kebakaran hutan lahan di kabupaten dalam tingkat waktu tanggap oleh BPBD Jumlah kejadian bencana Kabupaten - Jumlah penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban - Jumlah dokumen dilegalisasikan yang disusun	Kabid Bencana dan Rehabilitasi 100 %

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

1. JABATAN : KEPALA SUB BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA
2. TUGAS : Melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Bencana dan Rehabilitasi dalam penyusunan kebijakan, pengkoordinasian, hubungan kerja, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanggulangan bencana pada saat bencana dan rehabilitasi pasca bencana.
3. FUNGSI :
 - 1) Penyusunan perumusan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
 - 2) Penyusunan rencana dan program kerja tahunan subbid;
 - 3) Penyusunan bahan penetapan status keadaan darurat dan penanggulangan bencana;
 - 4) Pelaksanaan koordinasi dibidang Penanggulangan Bencana pada saat darurat;
 - 5) Pelaksanaan pengkajian dan identifikasi penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
 - 6) Pelaksanaan komunikasi, konsultasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka mengadakan evaluasi, pemberian bantuan dan penanganan bencana;
 - 7) Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan atasan, sesuai dengan lingkup tugas.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
➤ Meningkatkan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana pada kondisi Darurat.	1. Persentase Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	$\frac{\text{Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban bencana dan dampak kebakaran hutan lahan di kabupaten dalam tingkat waktu tanggap oleh BPBD}}{\text{Jumlah kejadian bencana Kabupaten}} \times 100\%$ - Jumlah penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban	Kabid Bencana dan Rehabilitasi

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

1. JABATAN : KEPALA SUB BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
2. TUGAS : Melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Bencana dan Rehabilitasi dalam penyiapan penyusunan kebijakan pelaksanaan pengkoordinasian program dan strategi penanggulangan bencana pada tahapan pasca bencana.
3. FUNGSI :
 - 1) Penyusunan kebijakan dan strategi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
 - 2) Pelaksanaan penyusunan rencana program tahunan subbid;
 - 3) Pelaksanaan koordinasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - 4) Pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan perbaikan lingkungan daerah bencana dan perbaikan sarana dan prasarana umum;
 - 5) Pelaksanaan koordinasi kegiatan pelayanan kesehatan;
 - 6) Pelaksanaan koordinasi pemulihan sosial psikologis, sosial ekonomi budaya dan pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - 7) Pelaksanaan penggalangan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - 8) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
 - 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Pelaksanaan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Tersedianya Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen dilegalisasikan yang disusu	Kabid Bencana dan Rehabilitasi

BAB V

PENUTUP

Renstra Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada akhirnya diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman yang memberi arah kebijakan yang lebih konkrit bagi pelaksanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam kurun waktu tahun 2025-2029, Sesuai dengan Kepmendagri Nomor : 900.1.2850 Tahun 2025

Keberhasilan penyusunan Renstra Perubahan SKPD Tahun 2025-2029 sangat ditentukan oleh kesamaan persepsi dan komunikasi secara manajemen dan teknis dalam upaya menciptakan sinergisitas perencanaan yang strategis sesuai dengan tugas dan fungsi dengan tetap memperhatikan asas kewenangan, efisiensi, efektivitas, aksesibilitas aspirasi masyarakat.

Diharapkan juga dengan telah disusunnya Renstra (Rencana Strategis) Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk 5 (lima) tahun ke depan (2025-2029) dapat menjadi acuan bagi masing-masing bidang dalam merencanakan program tahunan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja).

Kuala Tungkal, September 2025
Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



Drs. Zulfikri, M.AP
NIP.19660528 199103 1 003



\







































**TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

[illegible]

TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					14.307.526.264,00		18.737.984.716,00		22.207.133.596,00		25.027.002.160,00		29.668.086.460,00	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					10.231.807.024,00		12.278.168.428,00		15.584.502.114,00		17.680.562.537,00		21.216.675.044,00	
Meningkatnya kualitas pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Pemenuhan Komponen AKIP OPD (%)	100	100	100	10.231.807.024,00	100	12.278.168.428,00	100	15.584.502.114,00	100	17.680.562.537,00	100	21.216.675.044,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Persentase Pemenuhan Komponen SKM (%)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat		
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					4.075.719.240,00		6.459.816.288,00		6.622.631.482,00		7.346.439.623,00		8.451.411.416,00	
Meningkatnya kapasitas penanggulangan bencana Kabupaten	Persentase Cakupan Penanggulangan Bencana (*)	100	100	100	4.075.719.240,00	100	6.459.816.288,00	100	6.622.631.482,00	100	7.346.439.623,00	100	8.451.411.416,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
TOTAL KESELURUHAN					14307526264.00		18737984716.00		22207133596.00		25027002160.00		29668086460.00	

TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
1.05.0.00.0.00.04.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KAB. TANJUNG JABUNG BARAT							
- Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Terlindungnya masyarakat dari ancaman bencana	Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana Kabupaten	Meningkatnya kapasitas penanggulangan bencana Kabupaten		Indeks Risiko Bencana (Indeks)		
					Persentase Cakupan Penanggulangan Bencana (*)	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
				Meningkatnya Informasi Rawan Bencana Kabupaten	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.01 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun (Orang)	1.05.03.2.01 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun (Orang)	1.05.03.2.01.0007 - Sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	
					Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.01.0008 - Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Pelayanan Pencegahan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana (Kawasan)	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani (Kegiatan)	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya (laporan)	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya (Unit)	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Orang)	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan)	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota (Orang)	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani (Kegiatan)	1.05.03.2.02.0013 - Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya (Unit)	1.05.03.2.02.0015 - Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	
					Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota (Orang)	1.05.03.2.02.0018 - Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	1.05.03.2.02.0019 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	
					Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana (Kawasan)	1.05.03.2.02.0020 - Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	
					Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Orang)	1.05.03.2.02.0021 - Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.02.0022 - Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.02.0023 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	
					Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya (laporan)	1.05.03.2.02.0026 - Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.02.0027 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan)	1.05.03.2.02.0028 - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana pada kondisi darurat	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis (Orang)	1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
					Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal (Dokumen)	1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
					Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu (Dokumen)	1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dokumen)	1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
					Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)	1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
					Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)	1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
					Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas (Laporan)	1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota (Laporan)	1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
					Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas (Laporan)	1.05.03.2.03.0001 - Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	
					Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dokumen)	1.05.03.2.03.0002 - Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)	1.05.03.2.03.0003 - Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal (Dokumen)	1.05.03.2.03.0007 - Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis (Orang)	1.05.03.2.03.0008 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)	1.05.03.2.03.0009 - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu (Dokumen)	1.05.03.2.03.0010 - Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemil/Wabah Penyakit	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota (Laporan)	1.05.03.2.03.0012 - Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	
				Pelaksanaan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) (Orang)	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
					Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana (Dokumen)	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
					Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah (Dokumen)	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
					Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
					Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
					Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan (Kegiatan)	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	
					Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah (Dokumen)	1.05.03.2.04.0001 - Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		
					Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana (Dokumen)	1.05.03.2.04.0003 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		
					Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) (Orang)	1.05.03.2.04.0008 - Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota		
					Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan (Kegiatan)	1.05.03.2.04.0010 - Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota		
					Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.04.0015 - Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota		
					Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.04.0016 - Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota		
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah				Nilai AKIP OPD (*)		
						Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) (*)		
			Meningkatnya kualitas pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan publik			Persentase Pemenuhan Komponen AKIP OPD (%)	1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Persentase Pemenuhan Komponen SKM (%)	1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terlaksananya kualitas dokumen perencanaan dan laporan kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.05.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.05.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.05.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya laporan keuangan Tahunan OPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.05.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1.05.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.05.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1.05.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.05.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.05.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Jumlah Dokumen Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.05.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1.05.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Jumlah Penyediaan Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.05.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.05.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.05.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.05.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.05.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.05.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.05.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.05.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

TABEL 4.3 INDIKATOR KINERJA DAERAH
RANCANGAN AKHIR
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.05.0.00.0.00.04.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KAB. TANJUNG JABUNG BARAT										
I	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Desa/Kelurahan	134	134	134	134	134	134	134	
2	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Desa/Kelurahan	134	134	134	134	134	134	134	

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				14.307.526.264,00		18.737.984.716,00		22.207.133.596,00		25.027.002.160,00		29.668.086.460,00		
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				10.231.807.024,00		12.278.168.428,00		15.584.502.114,00		17.680.562.537,00		21.216.675.044,00		
Meningkatnya kualitas pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Pemenuhan Komponen AKIP OPD (%)	100	100	10.231.807.024,00	100	12.278.168.428,00	100	15.584.502.114,00	100	17.680.562.537,00	100	21.216.675.044,00	1.05.0.00.0.00.04.00 00 - BADAN PENANGGULANGA N BENCANA KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
	Persentase Pemenuhan Komponen SKM (%)	100	100				100		100		100			
1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				66.704.310,00		80.045.172,00		96.054.206,00		115.265.048,00		138.318.057,00		
Terlaksananya kualitas dokumen perencanaan dan laporan kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	6	6	66.704.310,00	6	80.045.172,00	6	96.054.206,00	6	115.265.048,00	6	138.318.057,00		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8	8		8		8		8		8			
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	6	6		6		6		6		6			
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	6	6		6		6		6		6			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	6	6		6		6		6		6			
1.05.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				22.640.310,00		27.168.372,00		32.602.046,00		39.122.456,00		46.946.949,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8	8	22.640.310,00	8	27.168.372,00	8	32.602.046,00	8	39.122.456,00	8	46.946.949,00		
1.05.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				7.344.000,00		8.812.800,00		10.575.360,00		12.690.432,00		15.228.518,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	6	6	7.344.000,00	6	8.812.800,00	6	10.575.360,00	6	12.690.432,00	6	15.228.518,00				
1.05.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				7.344.000,00		8.812.800,00		10.575.360,00		12.690.432,00		15.228.518,00				
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	6	6	7.344.000,00	6	8.812.800,00	6	10.575.360,00	6	12.690.432,00	6	15.228.518,00				
1.05.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				7.344.000,00		8.812.800,00		10.575.360,00		12.690.432,00		15.228.518,00				
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	6	6	7.344.000,00	6	8.812.800,00	6	10.575.360,00	6	12.690.432,00	6	15.228.518,00				
1.05.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				7.344.000,00		8.812.800,00		10.575.360,00		12.690.432,00		15.228.518,00				
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	6	6	7.344.000,00	6	8.812.800,00	6	10.575.360,00	6	12.690.432,00	6	15.228.518,00				
1.05.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				7.344.000,00		8.812.800,00		10.575.360,00		12.690.432,00		15.228.518,00				
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	12	12	7.344.000,00	12	8.812.800,00	12	10.575.360,00	12	12.690.432,00	12	15.228.518,00				
1.05.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7.344.000,00		8.812.800,00		10.575.360,00		12.690.432,00		15.228.518,00				
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	12	12	7.344.000,00	12	8.812.800,00	12	10.575.360,00	12	12.690.432,00	12	15.228.518,00				
1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.852.698.514,00		5.823.238.216,00		6.987.885.860,00		8.385.463.032,00		10.062.555.638,00				
Terlaksananya laporan keuangan Tahunan OPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	12	12	4.852.698.514,00	12	5.823.238.216,00	12	6.987.885.860,00	12	8.385.463.032,00	12	10.062.555.638,00				
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12		12		12		12		12					
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4	4		4		4		4		4					
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	26	26		26		26		26		26					
1.05.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.673.812.114,00		5.608.574.536,00		6.730.289.444,00		8.076.347.332,00		9.691.616.798,00				
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	26	26	4.673.812.114,00	26	5.608.574.536,00	26	6.730.289.444,00	26	8.076.347.332,00	26	9.691.616.798,00				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				167.706.000,00		201.247.200,00		241.496.640,00		289.795.968,00		347.755.162,00		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	167.706.000,00	12	201.247.200,00	12	241.496.640,00	12	289.795.968,00	12	347.755.162,00		
1.05.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5.590.200,00		6.708.240,00		8.049.888,00		9.659.866,00		11.591.839,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	12	12	5.590.200,00	12	6.708.240,00	12	8.049.888,00	12	9.659.866,00	12	11.591.839,00		
1.05.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				5.590.200,00		6.708.240,00		8.049.888,00		9.659.866,00		11.591.839,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4	4	5.590.200,00	4	6.708.240,00	4	8.049.888,00	4	9.659.866,00	4	11.591.839,00		
1.05.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				11.180.400,00		13.416.480,00		16.099.776,00		19.319.731,00		23.183.677,00		
Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	11.180.400,00	1	13.416.480,00	1	16.099.776,00	1	19.319.731,00	1	23.183.677,00		
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
1.05.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				5.590.200,00		6.708.240,00		8.049.888,00		9.659.865,00		11.591.838,00		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	5.590.200,00	1	6.708.240,00	1	8.049.888,00	1	9.659.865,00	1	11.591.838,00		
1.05.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				5.590.200,00		6.708.240,00		8.049.888,00		9.659.866,00		11.591.839,00		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	5.590.200,00	1	6.708.240,00	1	8.049.888,00	1	9.659.866,00	1	11.591.839,00		
1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				376.939.200,00		452.327.040,00		542.792.448,00		651.350.938,00		781.621.125,00		
Jumlah Dokumen Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4	4	376.939.200,00	4	452.327.040,00	4	542.792.448,00	4	651.350.938,00	4	781.621.125,00		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	100	100		100		100		100		100			
1.05.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				351.384.000,00		421.660.800,00		505.992.960,00		607.191.552,00		728.629.862,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	100	100	351.384.000,00	100	421.660.800,00	100	505.992.960,00	100	607.191.552,00	100	728.629.862,00		
1.05.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				25.555.200,00		30.666.240,00		36.799.488,00		44.159.386,00		52.991.263,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4	4	25.555.200,00	4	30.666.240,00	4	36.799.488,00	4	44.159.386,00	4	52.991.263,00		
1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				585.373.800,00		702.448.560,00		842.938.272,00		1.011.525.927,00		1.213.831.112,00		
Jumlah Penyediaan Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	585.373.800,00	12	702.448.560,00	12	842.938.272,00	12	1.011.525.927,00	12	1.213.831.112,00		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
1.05.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				11.180.400,00		13.416.480,00		16.099.776,00		19.319.731,00		23.183.677,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	11.180.400,00	12	13.416.480,00	12	16.099.776,00	12	19.319.731,00	12	23.183.677,00		
1.05.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				73.471.200,00		88.165.440,00		105.798.528,00		126.958.234,00		152.349.880,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	73.471.200,00	12	88.165.440,00	12	105.798.528,00	12	126.958.234,00	12	152.349.880,00		
1.05.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				5.590.200,00		6.708.240,00		8.049.888,00		9.659.866,00		11.591.839,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	5.590.200,00	12	6.708.240,00	12	8.049.888,00	12	9.659.866,00	12	11.591.839,00		
1.05.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				7.986.000,00		9.583.200,00		11.499.840,00		13.799.808,00		16.559.770,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12	7.986.000,00	12	9.583.200,00	12	11.499.840,00	12	13.799.808,00	12	16.559.770,00		
1.05.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				7.986.000,00		9.583.200,00		11.499.840,00		13.799.808,00		16.559.770,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12	7.986.000,00	12	9.583.200,00	12	11.499.840,00	12	13.799.808,00	12	16.559.770,00		
1.05.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				479.160.000,00		574.992.000,00		689.990.400,00		827.988.480,00		993.586.176,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	479.160.000,00	12	574.992.000,00	12	689.990.400,00	12	827.988.480,00	12	993.586.176,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				313.051.200,00		375.661.440,00		1.301.493.728,00		540.952.474,00		649.142.968,00		
Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	4	313.051.200,00	4	375.661.440,00	4	1.301.493.728,00	4	540.952.474,00	4	649.142.968,00		
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	11	0		0		11		0		0			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7	7		7		7		7		7			
1.05.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		850.700.000,00		0,00		0,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	11	0	0,00	0	0,00	11	850.700.000,00	0	0,00	0	0,00		
1.05.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				207.636.000,00		249.163.200,00		298.995.840,00		358.795.008,00		430.554.010,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7	7	207.636.000,00	7	249.163.200,00	7	298.995.840,00	7	358.795.008,00	7	430.554.010,00		
1.05.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				105.415.200,00		126.498.240,00		151.797.888,00		182.157.466,00		218.588.958,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	4	105.415.200,00	4	126.498.240,00	4	151.797.888,00	4	182.157.466,00	4	218.588.958,00		
1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.718.551.400,00		3.262.261.680,00		3.914.714.016,00		4.697.656.819,00		5.637.188.183,00		
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	2.718.551.400,00	12	3.262.261.680,00	12	3.914.714.016,00	12	4.697.656.819,00	12	5.637.188.183,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
1.05.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				20.763.600,00		24.916.320,00		29.899.584,00		35.879.501,00		43.055.401,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	20.763.600,00	12	24.916.320,00	12	29.899.584,00	12	35.879.501,00	12	43.055.401,00		
1.05.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				134.164.800,00		160.997.760,00		193.197.312,00		231.836.774,00		278.204.129,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	134.164.800,00	12	160.997.760,00	12	193.197.312,00	12	231.836.774,00	12	278.204.129,00		
1.05.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				79.860.000,00		95.832.000,00		114.998.400,00		137.998.080,00		165.597.696,00		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	79.860.000,00	12	95.832.000,00	12	114.998.400,00	12	137.998.080,00	12	165.597.696,00		
1.05.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.483.763.000,00		2.980.515.600,00		3.576.618.720,00		4.291.942.464,00		5.150.330.957,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	2.483.763.000,00	12	2.980.515.600,00	12	3.576.618.720,00	12	4.291.942.464,00	12	5.150.330.957,00		
1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.307.308.200,00		1.568.769.840,00		1.882.523.808,00		2.259.028.568,00		2.710.834.284,00		
Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7	7	1.307.308.200,00	7	1.568.769.840,00	7	1.882.523.808,00	7	2.259.028.568,00	7	2.710.834.284,00		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	25	25		25		25		25		25			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	25	25		25		25		25		25			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2		2		2		2		2			
1.05.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				239.580.000,00		287.496.000,00		344.995.200,00		413.994.240,00		496.793.088,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	25	25	239.580.000,00	25	287.496.000,00	25	344.995.200,00	25	413.994.240,00	25	496.793.088,00		
1.05.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				399.300.000,00		479.160.000,00		574.992.000,00		689.990.400,00		827.988.480,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	25	25	399.300.000,00	25	479.160.000,00	25	574.992.000,00	25	689.990.400,00	25	827.988.480,00		
1.05.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				239.580.000,00		287.496.000,00		344.995.200,00		413.994.240,00		496.793.088,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7	7	239.580.000,00	7	287.496.000,00	7	344.995.200,00	7	413.994.240,00	7	496.793.088,00		
1.05.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				364.960.200,00		437.952.240,00		525.542.688,00		630.651.226,00		756.781.471,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	364.960.200,00	1	437.952.240,00	1	525.542.688,00	1	630.651.226,00	1	756.781.471,00		
1.05.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				63.888.000,00		76.665.600,00		91.998.720,00		110.398.462,00		132.478.157,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	63.888.000,00	2	76.665.600,00	2	91.998.720,00	2	110.398.462,00	2	132.478.157,00		
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				4.075.719.240,00		6.459.816.288,00		6.622.631.482,00		7.346.439.623,00		8.451.411.416,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kapasitas penanggulangan bencana Kabupaten	Persentase Cakupan Penanggulangan Bencana (*)	100	100	4.075.719.240,00	100	6.459.816.288,00	100	6.622.631.482,00	100	7.346.439.623,00	100	8.451.411.416,00	1.05.0.00.0.00.04.00 00 - BADAN PENANGGULANGA N BENCANA KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
1.05.03.2.01 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				231.913.440,00		878.296.128,00		333.955.354,00		400.746.424,00		480.895.709,00		
Meningkatnya Informasi Rawan Bencana Kabupaten	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1	0	231.913.440,00	1	878.296.128,00	0	333.955.354,00	0	400.746.424,00	0	480.895.709,00		
	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun (Orang)	120	120				120				120			120
1.05.03.2.01.0007 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)				231.913.440,00		278.296.128,00		333.955.354,00		400.746.424,00		480.895.709,00		
Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per jenis ancaman bencana sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun (Orang)	120	120	231.913.440,00	120	278.296.128,00	120	333.955.354,00	120	400.746.424,00	120	480.895.709,00		
1.05.03.2.01.0008 - Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota				0,00		600.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang Sah dan Legal	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1	0	0,00	1	600.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				1.439.077.200,00		2.326.892.640,00		2.375.866.944,00		2.486.725.402,00		2.984.070.482,00		
Meningkatnya Pelayanan Pencegahan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota (Orang)	30	30	1.439.077.200,00	30	2.326.892.640,00	30	2.375.866.944,00	30	2.486.725.402,00	30	2.984.070.482,00		
	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya (Unit)	50	50				50				50			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya (laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Orang)	64	64		64		64		64		64			
	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1	1		1		0		0		0			
	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1	0		1		0		0		0			
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	10	10		10		10		10		10			
	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani (Kegiatan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana (Kawasan)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1	0		0		1		0		0			
1.05.03.2.02.0013 - Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota				158.122.800,00		189.747.360,00		227.696.832,00		273.236.198,00		327.883.438,00		
Terselenggaranya kegiatan untuk mengatasi akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) berdasarkan hasil kajian risiko bencana di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani (Kegiatan)	1	1	158.122.800,00	1	189.747.360,00	1	227.696.832,00	1	273.236.198,00	1	327.883.438,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.03.2.02.0015 - Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota				191.664.000,00		229.996.800,00		275.996.160,00		331.195.392,00		397.434.471,00		
Tersedianya alat perlindungan diri (APD) bagi individu, keluarga dan petugas untuk kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya (Unit)	50	50	191.664.000,00	50	229.996.800,00	50	275.996.160,00	50	331.195.392,00	50	397.434.471,00		
1.05.03.2.02.0018 - Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota				52.707.600,00		63.249.120,00		75.898.944,00		91.078.733,00		109.294.480,00		
Terlaksananya uji SOP pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota yang diikuti oleh warga negara di kawasan rawan bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota (Orang)	30	30	52.707.600,00	30	63.249.120,00	30	75.898.944,00	30	91.078.733,00	30	109.294.480,00		
1.05.03.2.02.0019 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				52.707.600,00		63.249.120,00		75.898.944,00		91.078.733,00		109.294.480,00		
Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	10	10	52.707.600,00	10	63.249.120,00	10	75.898.944,00	10	91.078.733,00	10	109.294.480,00		
1.05.03.2.02.0020 - Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana				351.384.000,00		421.660.800,00		505.992.960,00		607.191.552,00		728.629.862,00		
Terlaksananya penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana (Kawasan)	5	5	351.384.000,00	5	421.660.800,00	5	505.992.960,00	5	607.191.552,00	5	728.629.862,00		
1.05.03.2.02.0021 - Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota				210.830.400,00		252.996.480,00		303.595.776,00		364.314.932,00		437.177.917,00		
Meningkatnya kompetensi personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor untuk penanganan awal darurat bencana	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Orang)	64	64	210.830.400,00	64	252.996.480,00	64	303.595.776,00	64	364.314.932,00	64	437.177.917,00		
1.05.03.2.02.0022 - Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota				0,00		360.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya dokumen Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) yang sah dan legal	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1	0	0,00	1	360.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.05.03.2.02.0023 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana				0,00		0,00		303.595.776,00		0,00		0,00		
Tersedianya dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1	0	0,00	0	0,00	1	303.595.776,00	0	0,00	0	0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.03.2.02.0026 - Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota				210.830.400,00		252.996.480,00		303.595.776,00		364.314.931,00		437.177.917,00		
Tersedianya layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal serta dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya (laporan)	12	12	210.830.400,00	12	252.996.480,00	12	303.595.776,00	12	364.314.931,00	12	437.177.917,00		
1.05.03.2.02.0027 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota				0,00		240.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1	1	0,00	1	240.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.05.03.2.02.0028 - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota				210.830.400,00		252.996.480,00		303.595.776,00		364.314.931,00		437.177.917,00		
Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan)	5	5	210.830.400,00	5	252.996.480,00	5	303.595.776,00	5	364.314.931,00	5	437.177.917,00		
1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				1.432.832.400,00		1.719.398.880,00		2.063.278.656,00		2.779.531.163,00		2.971.121.265,00		
Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana pada kondisi darurat	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dokumen)	12	12	1.432.832.400,00	12	1.719.398.880,00	12	2.063.278.656,00	12	2.779.531.163,00	12	2.971.121.265,00		
	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis (Orang)	100	100		100		100		100		100			
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota (Laporan)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)	50	50		50		50		50		50			
	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)	100	100		100		100		100		100			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu (Dokumen)	3	0		0		0		3		0			
1.05.03.2.03.0001 - Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas				263.538.000,00		316.245.600,00		379.494.720,00		455.393.664,00		546.472.397,00		
Terlaksananya Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas (Laporan)	1	1	263.538.000,00	1	316.245.600,00	1	379.494.720,00	1	455.393.664,00	1	546.472.397,00		
1.05.03.2.03.0002 - Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota				258.890.400,00		310.668.480,00		372.802.176,00		447.362.611,00		536.835.133,00		
Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Penanganan Awal Untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama 1 X 24 Jam	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dokumen)	12	12	258.890.400,00	12	310.668.480,00	12	372.802.176,00	12	447.362.611,00	12	536.835.133,00		
1.05.03.2.03.0003 - Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota				260.343.600,00		312.412.320,00		374.894.784,00		449.873.741,00		539.848.490,00		
Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)	50	50	260.343.600,00	50	312.412.320,00	50	374.894.784,00	50	449.873.741,00	50	539.848.490,00		
1.05.03.2.03.0007 - Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota				52.707.600,00		63.249.120,00		75.898.944,00		91.078.733,00		109.294.479,00		
Tersusunnya dokumen rencana operasi kedaruratan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal (Dokumen)	1	1	52.707.600,00	1	63.249.120,00	1	75.898.944,00	1	91.078.733,00	1	109.294.479,00		
1.05.03.2.03.0008 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota				263.538.000,00		316.245.600,00		379.494.720,00		455.393.664,00		546.472.397,00		
Tersedianya SDM Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang kompeten dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis (Orang)	100	100	263.538.000,00	100	316.245.600,00	100	379.494.720,00	100	455.393.664,00	100	546.472.397,00		
1.05.03.2.03.0009 - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota				158.122.800,00		189.747.360,00		227.696.832,00		273.236.198,00		327.883.438,00		
Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)	100	100	158.122.800,00	100	189.747.360,00	100	227.696.832,00	100	273.236.198,00	100	327.883.438,00		
1.05.03.2.03.0010 - Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit				0,00		0,00		0,00		303.596.776,00		0,00		
Terlaksananya Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah dalam Penanganan Awal untuk KLB yang Ditingkatkan Statusnya Menjadi Darurat Bencana Non Alam Paling Lama 1x24 Jam	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu (Dokumen)	3	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	303.596.776,00	0	0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.03.2.03.0012 - Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana				175.692.000,00		210.830.400,00		252.996.480,00		303.595.776,00		364.314.931,00		
Terlaksananya Pengerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota (Laporan)	3	3	175.692.000,00	3	210.830.400,00	3	252.996.480,00	3	303.595.776,00	3	364.314.931,00		
1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				971.896.200,00		1.535.228.640,00		1.849.530.528,00		1.679.436.634,00		2.015.323.960,00		
Pelaksanaan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1	1	971.896.200,00	1	1.535.228.640,00	1	1.849.530.528,00	1	1.679.436.634,00	1	2.015.323.960,00		
	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah (Dokumen)	1	0		0		1		0		0			
	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana (Dokumen)	5	0		5		0		0		0			
	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) (Orang)	100	100		100		100		100		100			
	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan (Kegiatan)	1	1		1		1		1		1			
1.05.03.2.04.0001 - Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota				0,00		0,00		450.000.000,00		0,00		0,00		
Tersedianya Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah (Dokumen)	1	0	0,00	0	0,00	1	450.000.000,00	0	0,00	0	0,00		
1.05.03.2.04.0003 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota				0,00		368.953.200,00		0,00		0,00		0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana (Dokumen)	5	0	0,00	5	368.953.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.05.03.2.04.0008 - Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota				261.940.800,00		314.328.960,00		377.194.752,00		452.633.702,00		543.160.442,00		
Tersedianya Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P)	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) (Orang)	100	100	261.940.800,00	100	314.328.960,00	100	377.194.752,00	100	452.633.702,00	100	543.160.442,00		
1.05.03.2.04.0010 - Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota				307.461.000,00		368.953.200,00		442.743.840,00		531.292.608,00		637.551.130,00		
Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan (Kegiatan)	1	1	307.461.000,00	1	368.953.200,00	1	442.743.840,00	1	531.292.608,00	1	637.551.130,00		
1.05.03.2.04.0015 - Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota				201.247.200,00		241.496.640,00		289.795.968,00		347.755.162,00		417.306.194,00		
Tersedianya dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota yang sah dan legal	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1	1	201.247.200,00	1	241.496.640,00	1	289.795.968,00	1	347.755.162,00	1	417.306.194,00		
1.05.03.2.04.0016 - Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota				201.247.200,00		241.496.640,00		289.795.968,00		347.755.162,00		417.306.194,00		
Tersedianya dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1	1	201.247.200,00	1	241.496.640,00	1	289.795.968,00	1	347.755.162,00	1	417.306.194,00		

**TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN PER LOKASI DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

[illegible]

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	6	6		6		6		6		6				
1.05.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				22.640.310,00		27.168.372,00		32.602.046,00		39.122.456,00		46.946.949,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8	8	22.640.310,00	8	27.168.372,00	8	32.602.046,00	8	39.122.456,00	8	46.946.949,00			
1.05.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				7.344.000,00		8.812.800,00		10.575.360,00		12.690.432,00		15.228.518,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	6	6	7.344.000,00	6	8.812.800,00	6	10.575.360,00	6	12.690.432,00	6	15.228.518,00			
1.05.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				7.344.000,00		8.812.800,00		10.575.360,00		12.690.432,00		15.228.518,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	6	6	7.344.000,00	6	8.812.800,00	6	10.575.360,00	6	12.690.432,00	6	15.228.518,00			
1.05.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				7.344.000,00		8.812.800,00		10.575.360,00		12.690.432,00		15.228.518,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	6	6	7.344.000,00	6	8.812.800,00	6	10.575.360,00	6	12.690.432,00	6	15.228.518,00			
1.05.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				7.344.000,00		8.812.800,00		10.575.360,00		12.690.432,00		15.228.518,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	6	6	7.344.000,00	6	8.812.800,00	6	10.575.360,00	6	12.690.432,00	6	15.228.518,00			
1.05.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				7.344.000,00		8.812.800,00		10.575.360,00		12.690.432,00		15.228.518,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	12	12	7.344.000,00	12	8.812.800,00	12	10.575.360,00	12	12.690.432,00	12	15.228.518,00			
1.05.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7.344.000,00		8.812.800,00		10.575.360,00		12.690.432,00		15.228.518,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	12	12	7.344.000,00	12	8.812.800,00	12	10.575.360,00	12	12.690.432,00	12	15.228.518,00			
1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.852.698.514,00		5.823.238.216,00		6.987.885.860,00		8.385.463.032,00		10.062.555.638,00			
Terlaksananya laporan keuangan Tahunan OPD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	26	26	4.852.698.514,00	26	5.823.238.216,00	26	6.987.885.860,00	26	8.385.463.032,00	26	10.062.555.638,00			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD (Laporan)	4	4		4		4		4		4				
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12				
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12		12		12		12		12				
1.05.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.673.812.114,00		5.608.574.536,00		6.730.289.444,00		8.076.347.332,00		9.691.616.798,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	26	26	4.673.812.114,00	26	5.608.574.536,00	26	6.730.289.444,00	26	8.076.347.332,00	26	9.691.616.798,00			
1.05.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				167.706.000,00		201.247.200,00		241.496.640,00		289.795.968,00		347.755.162,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	167.706.000,00	12	201.247.200,00	12	241.496.640,00	12	289.795.968,00	12	347.755.162,00			
1.05.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5.590.200,00		6.708.240,00		8.049.888,00		9.659.866,00		11.591.839,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	12	12	5.590.200,00	12	6.708.240,00	12	8.049.888,00	12	9.659.866,00	12	11.591.839,00			
1.05.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				5.590.200,00		6.708.240,00		8.049.888,00		9.659.866,00		11.591.839,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD (Laporan)	4	4	5.590.200,00	4	6.708.240,00	4	8.049.888,00	4	9.659.866,00	4	11.591.839,00			
1.05.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				11.180.400,00		13.416.480,00		16.099.776,00		19.319.731,00		23.183.677,00			
Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	11.180.400,00	1	13.416.480,00	1	16.099.776,00	1	19.319.731,00	1	23.183.677,00			
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1				1		1						
1.05.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				5.590.200,00		6.708.240,00		8.049.888,00		9.659.865,00		11.591.838,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	5.590.200,00	1	6.708.240,00	1	8.049.888,00	1	9.659.865,00	1	11.591.838,00			
1.05.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				5.590.200,00		6.708.240,00		8.049.888,00		9.659.866,00		11.591.839,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	5.590.200,00	1	6.708.240,00	1	8.049.888,00	1	9.659.866,00	1	11.591.839,00			
1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				376.939.200,00		452.327.040,00		542.792.448,00		651.350.938,00		781.621.125,00			
Jumlah Dokumen Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4	4	376.939.200,00	4	452.327.040,00	4	542.792.448,00	4	651.350.938,00	4	781.621.125,00			
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	100	100				100		100		100				
1.05.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				351.384.000,00		421.660.800,00		505.992.960,00		607.191.552,00		728.629.862,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	100	100	351.384.000,00	100	421.660.800,00	100	505.992.960,00	100	607.191.552,00	100	728.629.862,00			
1.05.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				25.555.200,00		30.666.240,00		36.799.488,00		44.159.386,00		52.991.263,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4	4	25.555.200,00	4	30.666.240,00	4	36.799.488,00	4	44.159.386,00	4	52.991.263,00			
1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				585.373.800,00		702.448.560,00		842.938.272,00		1.011.525.927,00		1.213.831.112,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Jumlah Penyediaan Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	585.373.800,00	12	702.448.560,00	12	842.938.272,00	12	1.011.525.927,00	12	1.213.831.112,00			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12				
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12		12		12		12		12				
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12				
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12				
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12				
1.05.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				11.180.400,00		13.416.480,00		16.099.776,00		19.319.731,00		23.183.677,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	11.180.400,00	12	13.416.480,00	12	16.099.776,00	12	19.319.731,00	12	23.183.677,00			
1.05.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				73.471.200,00		88.165.440,00		105.798.528,00		126.958.234,00		152.349.880,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	73.471.200,00	12	88.165.440,00	12	105.798.528,00	12	126.958.234,00	12	152.349.880,00			
1.05.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				5.590.200,00		6.708.240,00		8.049.888,00		9.659.866,00		11.591.839,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	5.590.200,00	12	6.708.240,00	12	8.049.888,00	12	9.659.866,00	12	11.591.839,00			
1.05.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				7.986.000,00		9.583.200,00		11.499.840,00		13.799.808,00		16.559.770,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12	7.986.000,00	12	9.583.200,00	12	11.499.840,00	12	13.799.808,00	12	16.559.770,00			
1.05.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				7.986.000,00		9.583.200,00		11.499.840,00		13.799.808,00		16.559.770,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12	7.986.000,00	12	9.583.200,00	12	11.499.840,00	12	13.799.808,00	12	16.559.770,00			
1.05.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				479.160.000,00		574.992.000,00		689.990.400,00		827.988.480,00		993.586.176,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	479.160.000,00	12	574.992.000,00	12	689.990.400,00	12	827.988.480,00	12	993.586.176,00			
1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				313.051.200,00		375.661.440,00		1.301.493.728,00		540.952.474,00		649.142.968,00			
Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	11	0	313.051.200,00	0	375.661.440,00	11	1.301.493.728,00	0	540.952.474,00	0	649.142.968,00			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	4				4		4						
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7	7				7		7		7				
1.05.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		850.700.000,00		0,00		0,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	11	0	0,00	0	0,00	11	850.700.000,00	0	0,00	0	0,00			
1.05.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				207.636.000,00		249.163.200,00		298.995.840,00		358.795.008,00		430.554.010,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7	7	207.636.000,00	7	249.163.200,00	7	298.995.840,00	7	358.795.008,00	7	430.554.010,00			
1.05.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				105.415.200,00		126.498.240,00		151.797.888,00		182.157.466,00		218.588.958,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	4	105.415.200,00	4	126.498.240,00	4	151.797.888,00	4	182.157.466,00	4	218.588.958,00			
1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.718.551.400,00		3.262.261.680,00		3.914.714.016,00		4.697.656.819,00		5.637.188.183,00			
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	2.718.551.400,00	12	3.262.261.680,00	12	3.914.714.016,00	12	4.697.656.819,00	12	5.637.188.183,00			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12				12		12		12				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12				12		12		12				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12				12		12		12				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.05.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				20.763.600,00		24.916.320,00		29.899.584,00		35.879.501,00		43.055.401,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	20.763.600,00	12	24.916.320,00	12	29.899.584,00	12	35.879.501,00	12	43.055.401,00			
1.05.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				134.164.800,00		160.997.760,00		193.197.312,00		231.836.774,00		278.204.129,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	134.164.800,00	12	160.997.760,00	12	193.197.312,00	12	231.836.774,00	12	278.204.129,00			
1.05.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				79.860.000,00		95.832.000,00		114.998.400,00		137.998.080,00		165.597.696,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	79.860.000,00	12	95.832.000,00	12	114.998.400,00	12	137.998.080,00	12	165.597.696,00			
1.05.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.483.763.000,00		2.980.515.600,00		3.576.618.720,00		4.291.942.464,00		5.150.330.957,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	2.483.763.000,00	12	2.980.515.600,00	12	3.576.618.720,00	12	4.291.942.464,00	12	5.150.330.957,00			
1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.307.308.200,00		1.568.769.840,00		1.882.523.808,00		2.259.028.568,00		2.710.834.284,00			
Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7	7	1.307.308.200,00	7	1.568.769.840,00	7	1.882.523.808,00	7	2.259.028.568,00	7	2.710.834.284,00			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	25	25		25		25		25		25				
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	25	25		25		25		25		25				
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2		2		2		2		2				
1.05.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				239.580.000,00		287.496.000,00		344.995.200,00		413.994.240,00		496.793.088,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	25	25	239.580.000,00	25	287.496.000,00	25	344.995.200,00	25	413.994.240,00	25	496.793.088,00			
1.05.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				399.300.000,00		479.160.000,00		574.992.000,00		689.990.400,00		827.988.480,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	25	25	399.300.000,00	25	479.160.000,00	25	574.992.000,00	25	689.990.400,00	25	827.988.480,00			
1.05.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				239.580.000,00		287.496.000,00		344.995.200,00		413.994.240,00		496.793.088,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7	7	239.580.000,00	7	287.496.000,00	7	344.995.200,00	7	413.994.240,00	7	496.793.088,00			
1.05.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				364.960.200,00		437.952.240,00		525.542.688,00		630.651.226,00		756.781.471,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	364.960.200,00	1	437.952.240,00	1	525.542.688,00	1	630.651.226,00	1	756.781.471,00			
1.05.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				63.888.000,00		76.665.600,00		91.998.720,00		110.398.462,00		132.478.157,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	63.888.000,00	2	76.665.600,00	2	91.998.720,00	2	110.398.462,00	2	132.478.157,00			
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				4.075.719.240,00		6.459.816.288,00		6.622.631.482,00		7.346.439.623,00		8.451.411.416,00			
Meningkatnya kapasitas penanggulangan bencana Kabupaten	Persentase Cakupan Penanggulangan Bencana (*)	100	100	4.075.719.240,00	100	6.459.816.288,00	100	6.622.631.482,00	100	7.346.439.623,00	100	8.451.411.416,00	1.05.0.00.0.00.04.00 00 - BADAN PENANGGULANGA N BENCANA KAB. TANJUNG JABUNG BARAT		
1.05.03.2.01 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				231.913.440,00		878.296.128,00		333.955.354,00		400.746.424,00		480.895.709,00			
Meningkatnya Informasi Rawan Bencana Kabupaten	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1	0	231.913.440,00	1	878.296.128,00	0	333.955.354,00	0	400.746.424,00	0	480.895.709,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun (Orang)	120	120		120		120		120		120			KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
1.05.03.2.01.0007 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)				231.913.440,00		278.296.128,00		333.955.354,00		400.746.424,00		480.895.709,00			
Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per jenis ancaman bencana sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun (Orang)	120	120	231.913.440,00	120	278.296.128,00	120	333.955.354,00	120	400.746.424,00	120	480.895.709,00			
1.05.03.2.01.0008 - Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota				0,00		600.000.000,00		0,00		0,00		0,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Tersedianya dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang Sah dan Legal	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1	0	0,00	1	600.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				1.439.077.200,00		2.326.892.640,00		2.375.866.944,00		2.486.725.402,00		2.984.070.482,00			
Meningkatnya Pelayanan Pencegahan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya (laporan)	12	12	1.439.077.200,00	12	2.326.892.640,00	12	2.375.866.944,00	12	2.486.725.402,00	12	2.984.070.482,00			
	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota (Orang)	30	30				30				30				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan)	5	5		5		5		5		5				
	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Orang)	64	64		64		64		64		64				
	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya (Unit)	50	50		50		50		50		50				
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	10	10		10		10		10		10				
	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani (Kegiatan)	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana (Kawasan)	5	5		5		5		5		5				
	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1	0		0		1		0		0				
	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1	1		1		0		0		0				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1	0		1		0		0		0				
1.05.03.2.02.0013 - Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota				158.122.800,00		189.747.360,00		227.696.832,00		273.236.198,00		327.883.438,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Terselenggaranya kegiatan untuk mengatasi akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) berdasarkan hasil kajian risiko bencana di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani (Kegiatan)	1	1	158.122.800,00	1	189.747.360,00	1	227.696.832,00	1	273.236.198,00	1	327.883.438,00			
1.05.03.2.02.0015 - Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota				191.664.000,00		229.996.800,00		275.996.160,00		331.195.392,00		397.434.471,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Tersedianya alat perlindungan diri (APD) bagi individu, keluarga dan petugas untuk kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya (Unit)	50	50	191.664.000,00	50	229.996.800,00	50	275.996.160,00	50	331.195.392,00	50	397.434.471,00			
1.05.03.2.02.0018 - Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota				52.707.600,00		63.249.120,00		75.898.944,00		91.078.733,00		109.294.480,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Terlaksananya uji SOP pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota yang diikuti oleh warga negara di kawasan rawan bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota (Orang)	30	30	52.707.600,00	30	63.249.120,00	30	75.898.944,00	30	91.078.733,00	30	109.294.480,00			
1.05.03.2.02.0019 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				52.707.600,00		63.249.120,00		75.898.944,00		91.078.733,00		109.294.480,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	10	10	52.707.600,00	10	63.249.120,00	10	75.898.944,00	10	91.078.733,00	10	109.294.480,00			
1.05.03.2.02.0020 - Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana				351.384.000,00		421.660.800,00		505.992.960,00		607.191.552,00		728.629.862,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Terlaksananya penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana (Kawasan)	5	5	351.384.000,00	5	421.660.800,00	5	505.992.960,00	5	607.191.552,00	5	728.629.862,00			
1.05.03.2.02.0021 - Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota				210.830.400,00		252.996.480,00		303.595.776,00		364.314.932,00		437.177.917,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Meningkatnya kompetensi personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor untuk penanganan awal darurat bencana	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Orang)	64	64	210.830.400,00	64	252.996.480,00	64	303.595.776,00	64	364.314.932,00	64	437.177.917,00			
1.05.03.2.02.0022 - Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota				0,00		360.000.000,00		0,00		0,00		0,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Tersedianya dokumen Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) yang sah dan legal	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1	0	0,00	1	360.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
1.05.03.2.02.0023 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana				0,00		0,00		303.595.776,00		0,00		0,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Tersedianya dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1	0	0,00	0	0,00	1	303.595.776,00	0	0,00	0	0,00			
1.05.03.2.02.0026 - Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota				210.830.400,00		252.996.480,00		303.595.776,00		364.314.931,00		437.177.917,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Tersedianya layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal serta dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya (laporan)	12	12	210.830.400,00	12	252.996.480,00	12	303.595.776,00	12	364.314.931,00	12	437.177.917,00			
1.05.03.2.02.0027 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota				0,00		240.000.000,00		0,00		0,00		0,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1	1	0,00	1	240.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
1.05.03.2.02.0028 - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota				210.830.400,00		252.996.480,00		303.595.776,00		364.314.931,00		437.177.917,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan)	5	5	210.830.400,00	5	252.996.480,00	5	303.595.776,00	5	364.314.931,00	5	437.177.917,00			
1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				1.432.832.400,00		1.719.398.880,00		2.063.278.656,00		2.779.531.163,00		2.971.121.265,00			
Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana pada kondisi darurat	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)	100	100	1.432.832.400,00	100	1.719.398.880,00	100	2.063.278.656,00	100	2.779.531.163,00	100	2.971.121.265,00			
	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)	50	50		50		50		50		50				
	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas (Laporan)	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota (Laporan)	3	3		3		3		3		3				
	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dokumen)	12	12		12		12		12		12				
	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu (Dokumen)	3	0		0		0		3		0				
	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal (Dokumen)	1	1		1		1		1		1				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis (Orang)	100	100		100		100		100		100				
1.05.03.2.03.0001 - Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas				263.538.000,00		316.245.600,00		379.494.720,00		455.393.664,00		546.472.397,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Terlaksananya Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas (Laporan)	1	1	263.538.000,00	1	316.245.600,00	1	379.494.720,00	1	455.393.664,00	1	546.472.397,00			
1.05.03.2.03.0002 - Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota				258.890.400,00		310.668.480,00		372.802.176,00		447.362.611,00		536.835.133,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Penanganan Awal Untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama 1 X 24 Jam	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dokumen)	12	12	258.890.400,00	12	310.668.480,00	12	372.802.176,00	12	447.362.611,00	12	536.835.133,00			
1.05.03.2.03.0003 - Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota				260.343.600,00		312.412.320,00		374.894.784,00		449.873.741,00		539.848.490,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)	50	50	260.343.600,00	50	312.412.320,00	50	374.894.784,00	50	449.873.741,00	50	539.848.490,00			
1.05.03.2.03.0007 - Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota				52.707.600,00		63.249.120,00		75.898.944,00		91.078.733,00		109.294.479,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Tersusunnya dokumen rencana operasi kedaruratan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal (Dokumen)	1	1	52.707.600,00	1	63.249.120,00	1	75.898.944,00	1	91.078.733,00	1	109.294.479,00			
1.05.03.2.03.0008 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota				263.538.000,00		316.245.600,00		379.494.720,00		455.393.664,00		546.472.397,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Tersedianya SDM Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang kompeten dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis (Orang)	100	100	263.538.000,00	100	316.245.600,00	100	379.494.720,00	100	455.393.664,00	100	546.472.397,00			
1.05.03.2.03.0009 - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota				158.122.800,00		189.747.360,00		227.696.832,00		273.236.198,00		327.883.438,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)	100	100	158.122.800,00	100	189.747.360,00	100	227.696.832,00	100	273.236.198,00	100	327.883.438,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.05.03.2.03.0010 - Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit				0,00		0,00		0,00		303.596.776,00		0,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Terlaksananya Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah dalam Penanganan Awal untuk KLB yang Ditingkatkan Statusnya Menjadi Darurat Bencana Non Alam Paling Lama 1x24 Jam	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu (Dokumen)	3	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	303.596.776,00	0	0,00			
1.05.03.2.03.0012 - Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana				175.692.000,00		210.830.400,00		252.996.480,00		303.595.776,00		364.314.931,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Terlaksananya Pengerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota (Laporan)	3	3	175.692.000,00	3	210.830.400,00	3	252.996.480,00	3	303.595.776,00	3	364.314.931,00			
1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				971.896.200,00		1.535.228.640,00		1.849.530.528,00		1.679.436.634,00		2.015.323.960,00			
Pelaksanaan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1	1	971.896.200,00	1	1.535.228.640,00	1	1.849.530.528,00	1	1.679.436.634,00	1	2.015.323.960,00			
	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) (Orang)	100	100		100		100		100						
	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana (Dokumen)	5	0		5		0		0		0				
	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan (Kegiatan)	1	1		1		1		1		1				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah (Dokumen)	1	0		0		1		0		0				
1.05.03.2.04.0001 - Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota				0,00		0,00		450.000.000,00		0,00		0,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Tersedianya Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah (Dokumen)	1	0	0,00	0	0,00	1	450.000.000,00	0	0,00	0	0,00			
1.05.03.2.04.0003 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota				0,00		368.953.200,00		0,00		0,00		0,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana (Dokumen)	5	0	0,00	5	368.953.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
1.05.03.2.04.0008 - Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota				261.940.800,00		314.328.960,00		377.194.752,00		452.633.702,00		543.160.442,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Tersedianya Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P)	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) (Orang)	100	100	261.940.800,00	100	314.328.960,00	100	377.194.752,00	100	452.633.702,00	100	543.160.442,00			
1.05.03.2.04.0010 - Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota				307.461.000,00		368.953.200,00		442.743.840,00		531.292.608,00		637.551.130,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan (Kegiatan)	1	1	307.461.000,00	1	368.953.200,00	1	442.743.840,00	1	531.292.608,00	1	637.551.130,00			
1.05.03.2.04.0015 - Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota				201.247.200,00		241.496.640,00		289.795.968,00		347.755.162,00		417.306.194,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Tersedianya dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota yang sah dan legal	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1	1	201.247.200,00	1	241.496.640,00	1	289.795.968,00	1	347.755.162,00	1	417.306.194,00			
1.05.03.2.04.0016 - Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota				201.247.200,00		241.496.640,00		289.795.968,00		347.755.162,00		417.306.194,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Tersedianya dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1	1	201.247.200,00	1	241.496.640,00	1	289.795.968,00	1	347.755.162,00	1	417.306.194,00			

TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1.05.0.00.0.00.04.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KAB. TANJUNG JABUNG BARAT				
1.	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Meningkatnya kapasitas penanggulangan bencana Kabupaten	1.05.03.2.01 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	
			1.05.03.2.01.0008 - Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	
			1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
			1.05.03.2.04.0001 - Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
			1.05.03.2.04.0003 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
			1.05.03.2.04.0008 - Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	
			1.05.03.2.04.0010 - Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	
			1.05.03.2.04.0015 - Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	
			1.05.03.2.04.0016 - Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	

TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	1.05.0.00.0.00.04.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KAB. TANJUNG JABUNG BARAT									
2.	Indeks Risiko Bencana	Indeks	97	96	95	94	93	92	91	

TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI
RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
2.	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	positif	Desa/Kelurahan	134	134	134	134	134	134	134	
3.	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	positif	Desa/Kelurahan	134	134	134	134	134	134	134	